

**KEBIJAKAN DANA DESA ; IMPLEMENTASI PENURUNAN
KETIMPANGAN EKONOMI DESA-KOTA UNTUK PENINGKATAN
EKONOMI PADA KAWASAN KALDERA TOBA SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Ekonomi Pembangunan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : WAHYU RAMADHANI
Npm : 1705180008
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata -I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, 13 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : WAHYU RAMADHANI
NPM : 1705180008
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : KEBIJAKAN DANA DESA ; IMPLEMENTASI PENURUNAN KETIMPANGAN EKONOMI DESA-KOTA UNTUK PENINGKATAN EKONOMI PADA KAWASAN KALDERA TOBA SUMATERA UTARA

DINYATAKAN : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si)

Penguji II

(HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E, M.M, M.Si)

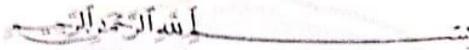
Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : WAHYU RAMADHANI
NPM : 1705180008
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : KEBIJAKAN DANA DESA ; IMPLEMENTASI PENURUNAN
KETIMPANGAN EKONOMI DESA-KOTA UNTUK
PENINGKATAN EKONOMI PADA KAWASAN KALDERA TOBA
SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
Skripsi

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Diketahui /Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis



G. JANURI, S.E, M.M, M.Si

Kedua orang yang selalu aku hormati

Aku sayangi dan selalu aku junjung kehormatannya

Ibu yang telah mengandungku selama sembilan bulan

Peran ayah yang mendidik dan mencari nafkah banting tulang

Terima kasih sudah sejauh ini dan tetap tegak berdiri menjadi penopang

Berkatmu aku masih bisa melihat indahnya semesta

Tertatih menjadi saksi perjalanan pendewasaanku

Dua orang yang pertama kali berdiri ketika aku jatuh

Hanya doa yang sampai detik ini selalu aku selipkan disetiap solatku

ABSTRAK

Kebijakan dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meringankan kemiskinan serta untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tujuan penggunaan dana desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah Melakukan Analisa Ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan indikator sosial dan ekonomi pada desa yang menjadi tujuan wisata yang berada di pinggir Danau Toba dan Melakukan Analisa efisiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Desa pada Desa wisata yang berada di pinggir Danau Toba.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, dimana data yang dihimpun adalah data *cross section* dengan objek penelitian 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba dan juga data runtut waktu (*time series*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji analisis faktor.

Berdasarkan hasil uji analisis faktor, variabel Komponen dana desa sesuai SOP dan variabel Transparansi & Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba, sedangkan variabel Output Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.

Kata Kunci :Dana Desa, Kebijakan Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, PDRB

KATA PENGANTAR



Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, kesabaran, serta kekuatan dan tak lupa pula Shalawat bernadakan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: “Kebijakan Dana Desa ; Implementasi Penurunan Ketimpangan Ekonomi Desa-Kota Untuk Peningkatan Ekonomi Pada Kawasan Kaldera Toba Sumatera Utara”, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penelitian skripsi ini penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun demikian penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas sehingga terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah membimbing penulis, baik moril, materil dan ide-ide pemikiran.

Skripsi ini dipersembahkan terkhusus kepada Kedua Orang tua saya Bapak Julianto dan Ibu Saniah yang telah memberikan do'a, spiritual, moral, dan materil yang tidak akan ternilai. Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
4. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Kakak saya dan Keluarga Kecilnya yang telah memberi support dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada tim Kaldera Toba (sicabee, gomell, dan agung) yang telah saling membantu dan saling support untuk kerjasamanya.
8. Kepada seluruh teman jurusan saya yang telah memberi semangat dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar Ekonomi Pembangunan UMSU dari angkatan 2017 – 2020
10. Seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu demi satu.

Seluruh bantuan yang tidak ternilai harganya ini tidak dapat saya balas satu per satu, semoga Allah SWT membalasnya sebagai amal ibadah dan akan menjadi manfaat yang sangat besar bagi kita semua, Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, September 2021
Penulis,

WAHYU RAMADHANI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	29
1.3 Batasan Masalah	30
1.4 Rumusan Masalah	30
1.5 Tujuan Penelitian	30
1.6 Manfaat Penelitian	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
2.1 Uraian Teoritis	33
2.1.1 Teori Pendapatan Nasional	33
2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi	39
2.1.3 Teori Pengeluaran Negara	52
2.1.4 Kebijakan Fiskal	56
2.2 Regulasi atau Kebijakan	
2.2.1 Desentralisasi Fiskal	61
2.2.2 Kebijakan Dana Desa	63
2.3 Penelitian Terdahulu	69
2.4 Kerangka Analisis Penelitian	70
2.4.1 Bagan Tahapan Penelitian	70
2.4.2 Model Analisa Faktor	71

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	72
3.1 Pendekatan Penelitian	72
3.2 Definisi Operasional.....	73
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	73
3.4 Jenis dan Sumber Data	73
3.5 Populasi dan Sampel	73
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	77
3.7 Teknik Analisis Data.....	77
3.8 Analisa Faktor	79
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	82
4.1 Gambaran Umum Kawasan Kaldera Toba	82
4.1.1 Letak Geografis.....	82
4.1.2 Kondisi Iklim	84
4.1.3 Kondisi Topografi.....	86
4.2 Demografi	89
4.2.1 Jumlah Penduduk Kawasan Kaldera Toba	89
4.2.2 Tenaga Kerja.....	90
4.3 Kondisi Ekonomi	90
4.3.1 Nilai PDRB	90
4.3.2 Struktur Ekonomi	93
4.3.3 Pertumbuhan Ekonomi	94
4.3.4 PDRB Perkapita	97
4.3.5 Gini Ratio	98
4.3.6 Inflasi	99

4.4 Kondisi Sosial	100
4.4.1 Kemiskinan	100
4.4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	102
4.5 Analisa Faktor	106
4.5.1 Deskriptif Data.....	106
4.5.2 Deskriptif Profil Responden	106
4.5.3 Hasil Penelitian Analisis SEM-PLS	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
5.1 Kesimpulan	121
5.2 Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengalokasian Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	13
Tabel 1.2	Pengalokasian Dana Desa Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020	24
Tabel 1.3	Dana Desa di 7 Kabupaten Kawasan Kaldera Toba Tahun 2019-2021	28
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	69
Tabel 3.1	Definisi Operasional	73
Tabel 4.1	Luas Daerah Menurut Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba Tahun 2020	83
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin 7 Kabupaten Kawasan Kaldera Toba	89
Tabel 4.3	Jumlah Angkatan Kerja Menurut 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba Tahun 2020	90
Tabel 4.4	PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan di 7 Kabupaten Kawasan Kaldera Toba Tahun 2020	91
Tabel 4.5	Struktur Ekonomi Penyumbang PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kawasan Kaldera Toba Tahun 2020	93

Tabel 4.6	Pertumbuhan Ekonomi 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba Tahun 2020	94
Tabel 4.7	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba.....	97
Tabel 4.8	Gini Ratio 7 Kabupaten Kawasan Kaldera Toba	98
Tabel 4.9	Jumlah Penduduk Miskin di 7 Kabupaten Kawasan Kaldera Toba Tahun 2020	100
Tabel 4.10	Garis Kemiskinan 7 Kabupaten Kawasan Kaldera Toba.....	101
Tabel 4.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Kaldera Toba Tahun 2015 dan 2020	102
Tabel 4.12	Perkembangan UHH, HLS, Pengeluaran Per Kapita di 7 Kabupaten Kawasan Kaldera Toba Tahun 2015 dan 2020	104
Tabel 4.13	Kuesioner Variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP	110
Tabel 4.14	Kuesioner Variabel Transparansi & Akuntabilitas	111
Tabel 4.15	Kuesioner Variabel Output Dana Desa	111
Tabel 4.16	Convergent Validity Komponen Dana Desa Sesuai SOP	112
Tabel 4.17	Convergent Validity Transparansi & Akuntabilitas	112
Tabel 4.18	Convergent Validity Output Dana Desa	113
Tabel 4.19	Convergent Validity Pengelolaan Dana Desa	113
Tabel 4.20	Convergent Validity Komponen Dana Desa Sesuai SOP	114
Tabel 4.21	Convergent Validity Transparansi & Akuntabilitas	114
Tabel 4.22	Convergent Validity Output Dana Desa	115
Tabel 4.23	Discriminante Validity Pada Average Extracted (AVE)	116
Tabel 4.24	Composite Reliability	117

Tabel 4.25 R-Square	118
Tabel 4.26 Uji Hipotesis	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2020	8
Gambar 1.2	Perkembangan Pembangunan Desa	14
Gambar 1.3	Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status Indeks Pembangunan Desa 2014 dan 2018	15
Gambar 1.4	Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status Indeks Pembangunan Desa	16
Gambar 1.5	Jumlah Desa Menurut Status Indeks Pembangunan Desa 2018 .	17
Gambar 2.1	Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	56
Gambar 2.2	Bagan Alur Penelitian	70
Gambar 2.3	Kerangka Konseptual Model Analisa Faktor	71
Gambar 4.1	Peta Kawasan Kaldera Toba	82
Gambar 4.2	Peta Kondisi Topografi Kawasan Kaldera Toba.....	87
Gambar 4.3	Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar Bulan Januari-Agustus Tahun 2021	99
Gambar 4.4	Jenis Kelamin Responden	106
Gambar 4.5	Usia Responden	107
Gambar 4.6	Tingkat Pendidikan Responden	108
Gambar 4.7	Penghasilan Perbulan Responden	109
Gambar 4.8	First Outer Loading	110
Gambar 4.9	Second Outer Loading	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup, kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Akibat adanya perbedaan dan keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah Indonesia yang diikuti dengan perbedaan kinerja setiap daerah telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah (Todaro, 2011).

Pembangunan sendiri merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus menerus dilakukan untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing maju yang pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari Pertumbuhan Ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan Pendapatan Nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto (PNB, GNP) riil

dinegara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional : mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan upaya dalam meningkatkan kapasitas pemerintah secara profesional untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta dapat mengelola sumber daya didalamnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta upaya yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segalapotensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejak dulu, desa identik dengan daerah pinggiran, persawahan, kurangnya fasilitas dan lainnya. Namun hal ini mungkin saja sudah berubah, karena adanya pembangunan dengan prioritas wilayah desa. Seperti yang disebutkan sebelumnya pada salah satu strategi pembangunan nasional, tepatnya pada dimensi pemerataan dan kewilayahan yang menekankan dengan prioritas wilayah desa, wilayah pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.

Pembangunan daerah dan desa merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Jokowi-JK sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita ketiga yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Pembangunan desa atau daerah kini sudah jelas telah menjadi prioritas utama pemerintah. Pembangunan kini diratakan ke seluruh Indonesia bahkan pemerintahan saat ini tengah mengutamakan pembangunan daerah pinggiran ketimbang pembangunan Ibu Kota agar elemen masyarakat terkena dampak pembangunan.

Adanya prioritas pembangunan di wilayah desa ini dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah mengurangi terjadinya migrasi penduduk desa ke wilayah kota. Hal ini dapat terjadi dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa, baik itu Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, dan lainnya. Lebih jauh lagi, sarana dan prasarana ekonomi perlu dibangun di desa. Adanya sarana dan prasarana ekonomi di desa ini akan memberikan peluang usaha yang akan memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk desa. Jika di desa-desa sudah banyak terbuka lapangan usaha, seharusnya migrasi penduduk desa ke kota akan berkurang.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks pembangunan daerah baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. Pembangunan desa ditunjukkan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawali implementasi UU no.6 Tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan supervise, dan pendampingan (Adisasmita,2006).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sekitar 50,21% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan (BPS, 2015).

Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, diberikan kewenangan yang mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada desa. Kebijakan dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Salah satu tujuannya adalah pengentasan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Tujuan penggunaan dana desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain Dana Desa tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD), yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 persen.

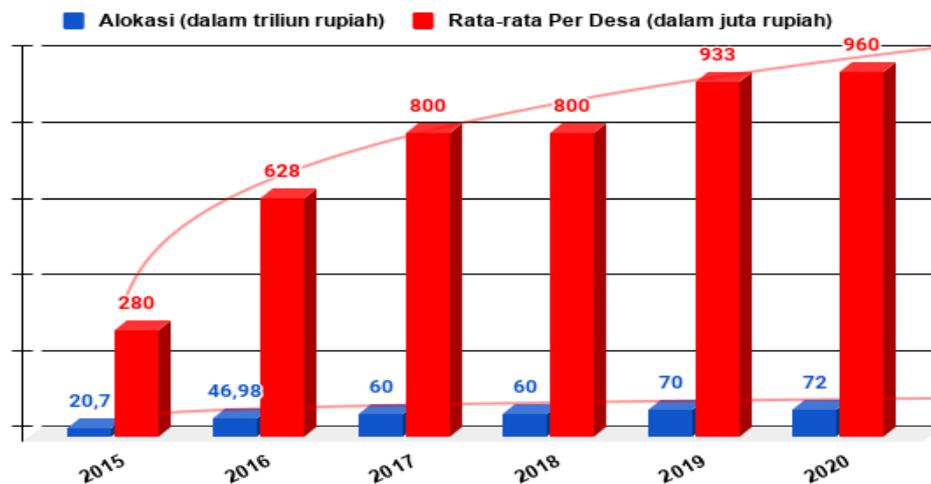
Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa, dalam perkembangannya. Sehingga mencapai menjadi desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. (Sriniyati ,dkk 2019).

Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa sertamemperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-undang desa mengamanatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Sriniyati ,dkk 2019).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan dana desa yang besarnya sekitar 1 milyar rupiah bagi 74.958 desa di seluruh Indonesia untuk membangun desa. Keberadaan dana desa ini diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengembangkan desanya seraya mengubah cara pandang selama ini bahwa pembangunan hanya berlangsung di perkotaan.

Awal Juli 2015 dana desa akhirnya mulai turun walau sempat muncul kekhawatiran akan terhambatnya pencairan dana desa terkait adanya tarik-menarik kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT). Pada awal diluncurkan dana desa, rata-rata desa mendapatkan dana sebesar Rp. 283,77 juta. Alokasi ini belum ditambahkan dari Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Setiap desa di Indonesia setidaknya menerima dana sebesar Rp.750 juta yang meliputi Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Gambar 1.1
Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2020



Sumber : Kemenkeu 2020 (www.kemenkeu.go.id)

Dari tahun ke tahun, dana desa tersebut terus meningkat (Gambar 1.1). Hingga tahun 2020, diketahui total anggaran yang di gelontorkan pemerintah untuk desa mencapai Rp.329,68 triliun bagi desa di seluruh Indonesia yang menerima bantuan. Dengan rincian per tahun, yaitu Tahun 2015 sebesar Rp.20,7

triliun dengan rata-rata per desa menerima alokasi dana desa sebesar Rp.280 juta, Tahun 2016 sebesar Rp.46,98 triliun dengan rata-rata per desa menerima alokasi dana desa sebesar Rp.628 juta, Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar Rp.60 triliun dengan rata-rata per desa menerima alokasi dana desa sebesar Rp.800 juta, Tahun 2017 sebesar Rp.70 triliun dengan rata-rata per desa menerima alokasi dana desa sebesar Rp.933 juta, dan Tahun 2020 sebesar Rp.72 triliun dengan rata-rata per desa menerima alokasi dana desa sebesar Rp.960 juta.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa ini diatur prioritas penggunaannya setiap tahun. Pada tahun 2018, prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Program dan kegiatan tersebut antara lain untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat seperti pembangunan jalan desa, jembatan, pasar desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa seperti pembangunan polindes, MCK, posyandu, dan lain-lain.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat(Kemenkeu,2016).

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan DD dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.(Thomas,2013).

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud daripemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Hal ini dilakukan agar desa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan

pelayanan yang lebih baik kepada warga desanya. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan mempercepat laju pembangunan nasional.

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004) yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (PP 72/2005) yang memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Berdasarkan PP.72/2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikan merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintah dan sosial masyarakat.

Hal tersebut selaras dengan kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah terkait pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana sejak 1 Januari 2001 Indonesia resmi mengimplementasikan pola otonomi daerah dari sisi kewenangan serta sisi keuangan melalui desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut didasarkan kepada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari sisi kewenangan, sebelumnya pelaksanaan otonomi daerah diletakkan di level provinsi namun saat ini penyerahan wewenangan lebih dititikberatkan di level kabupaten/kota. Hal ini tentu saja dapat memperpendek rentang birokrasi. Dari sisi keuangan, desentralisasi fiskal dimaksudkan sebagai salah satu kebijakan

bagi pemerintah untuk menciptakan aspek kemandirian dalam memenuhi aspek penciptaan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum.

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi ekonomi 1998 dengan tujuan dapat mencapai pemerataan pembangunan ekonomi diseluruh daerah, kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonominya. Tujuan utamanya untuk melakukan estimasi dan membuktikan bagaimana variable transfer daerah seperti DID, DAU, DAK, dan DD dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan ekonomi. Selanjutnya IPM dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi model 2SLS.

Sejalan dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, melalui desentralisasi fiskal, diharapkan alokasi anggaran daerah akan semakin efektif dan efisien. Melalui peningkatan efisiensi alokasi anggaran diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan akan berdampak besar pada berbagai sektor ekonomi, seperti meningkatnya konsumsi, kebutuhan akan jasa perencanaan dan pembangunan, serta penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, desentralisasi diharapkan dapat memicu kreativitas dan ide baru oleh para pelaku di daerah serta memberikan dampak yang sangat positif, terutama menyangkut pemerataan PDB per kapita di Indonesia. Pemerataan pendapatan ini akan berarti meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja di daerah, termasuk pekerjaan yang berpendapatan tinggi (*high paying jobs*).

Salah satu komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan peningkatan jumlah alokasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) dalam jangka menengah. Sejalan dengan amanat UU Desa, jumlah alokasi TKD kemudian juga ditambah dengan komponen Dana Desa (DD) sejak tahun 2018. Bahkan jika dilihat dalam postur APBN 2020, alokasi belanja TKDD lebih besar dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pusat.

Tabel 1.1

Pengalokasian Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Tahun	Belanja Negara (dalam triliun rupiah)	Belanja K/L Pusat (dalam triliun rupiah)	TKDD (dalam triliun rupiah)
2018	2.220,7	1.454,5	766,2
2019	2.095,7	1.634,3	826,77
2020	2.589,9	1.827,4	856,94

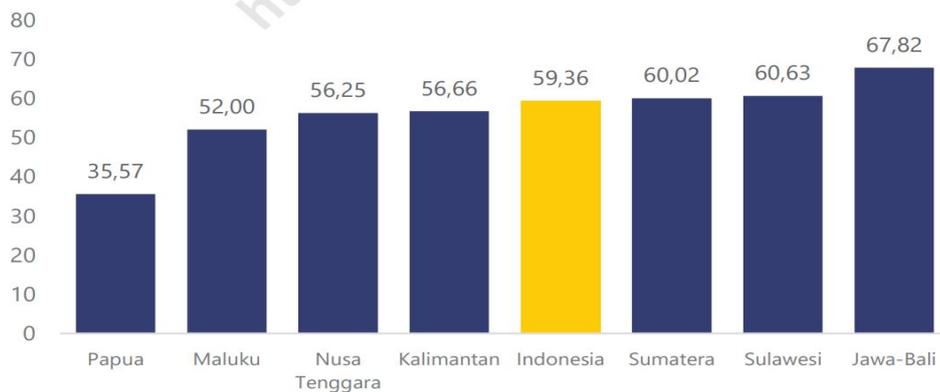
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Alokasi belanja TKDD difokuskan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah serta antardaerah; menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; meningkatkan daya saing daerah; serta meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Untuk mendukung berbagai kebijakan tersebut, anggaran belanja TKDD diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka menengah.

Pembangunan Desa menjadi bagian penting yang menjadi target pemerintah, tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Tujuan pembangunan desa ini untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan

jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa ditahun 2019. Pada awal RPJMN, pemerintah telah memetakan jumlah wilayah administrasi desa yang teregistrasi melalui Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 yang jumlahnya mencapai 74.093 desa.

Gambar 1.2
Perkembangan Pembangunan Desa



Sumber : BPS Indeks Pembangunan Desa (www.bps.go.id)

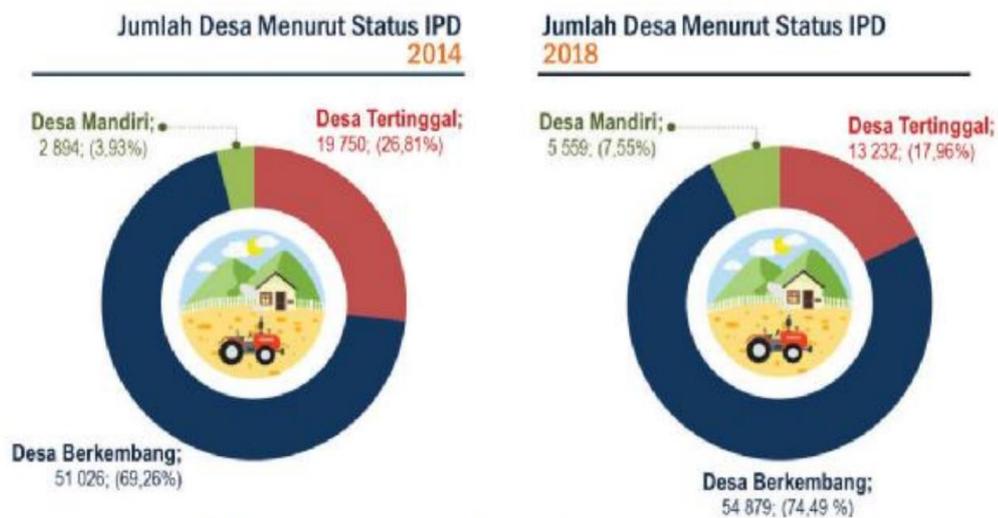
Secara nasional, tahap perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59,36. Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan ada tiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa nasional (59,36). Ketiga pulau tersebut adalah pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara empat pulau lain berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Nilai IPD paling besar terdapat di Pulau Jawa-Bali (67,82). Sementara indeks paling rendah terdapat di Pulau Papua (35,57). Dilihat dari tingkat perkembangannya, 73,40 persen desa di Indonesia pada umumnya termasuk dalam kategori desa berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar pulau

yang rata-rata indeksnya masuk dalam kategori desa berkembang. Pulau-pulau tersebut antara lain: Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sementara Pulau Papua rata-rata perkembangan desanya masih dalam kategori desa tertinggal.

Gambar 1.3

Perkembangan Pembangunan Desa menurut Status Indeks Pembangunan Desa 2014 dan 2018



Sumber: BPS Indeks Pembangunan Desa Provinsi, 2014

Memenuhi target pembangunan desa, pemerintah memetakan pembangunan desa berdasarkan tingkat pembangunannya menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) ke dalam 3 (tiga) klasifikasi. Hasilnya, berdasarkan Publikasi IPD tahun 2014, desa mandiri berjumlah 2.898 desa; desa berkembang berjumlah 50.763 desa; dan desa tertinggal berjumlah 20.432 desa. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi, terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Namun, untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa dari tahun 2014 dan 2018, dilakukan penyamaan desa antara 2014 dan 2018. Hal ini bertujuan, supaya pembangunan yang wilayah yang dilaksanakan antara tahun

2014 dan 2018 merujuk pada suatu wilayah yang sama. Jika tidak, maka akan terjadi bias pemekaran dan penggabungan wilayah. Dengan demikian, asumsi pemekaran dan penggabungan wilayah perlu direduksi dengan menyatukan kembali desa yang mengalami pemekaran dan menyesuaikan kembali desa yang mengalami penggabungan sejak 2014 hingga 2018. Sehingga wilayah desa yang dapat dilihat perkembangannya secara panel 2014 dan 2018 sebesar 73.670 desa.

Perkembangan pembangunan desa yang secara panel ini dilakukan untuk mengetahui realitas pembangunan desa yang sesungguhnya, dan memperkirakan seberapa besar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa. Hasilnya menunjukkan bahwa desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa dan desa mandiri bertambah sebanyak 2.665 desa, dapat dilihat pada grafik diatas.

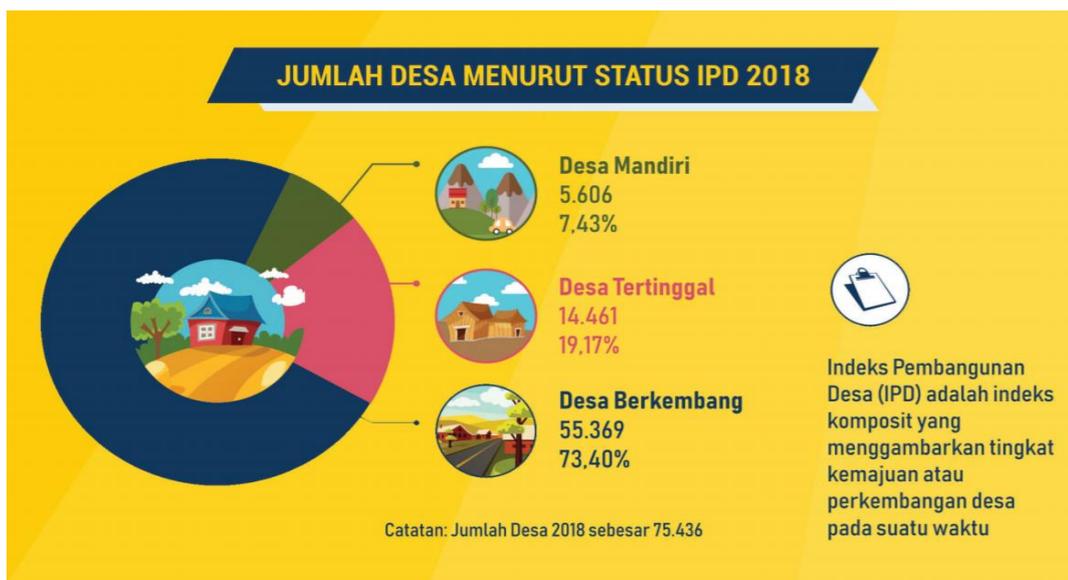
Gambar 1.4
Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status Indeks Pembangunan Desa



Sumber : BPS Indeks Pembangunan Desa 2018 (www.bps.gp.id)

Dilihat dari grafik diatas menunjukkan Pelayanan Dasar terjadi peningkatan sebesar 0,92. Infrastruktur juga mengalami peningkatan sebesar 5,42, Transportasi meningkat sebesar 3,50. Pelayanan umum meningkat 1,88 dan penyelenggaraan pemerintah desa meningkat 9,81 serta Indeks Pembangunan Desa meningkat 3,65. Dari dimensi-dimensi diatas penyelenggaraan pemerintah maju lebih pesat dibanding yang lain disusul oleh infrastruktur dan yang paling rendah adalah pelayanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2018 terjadi perkembangan dari tiap tiap dimensi.

Gambar 1.5
Jumlah Desa Menurut Status Indeks Pembangunan Desa 2018



Sumber : BPS Indeks Pembangunan Desa 2018 (www.bps.go.id)

Dilihat dari grafik diatas berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018, jumlah Desa Mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43%), Desa Tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17%), dan Desa Berkembang sebanyak 55.349 desa (73,40%) dari total jumlah desa pada 2018 sebesar 75.436 desa. Sebaran desa tertinggal terbanyak di Pulau Papua sebanyak 6.305 desa. Sementara desa

berkembang dan mandiri paling banyak di Pulau Jawa-Bali dengan 19.072 desa berkembang dan 3.839 desa mandiri.

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya *Sustainable Development Goals* (SDGs).

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Mengutip dari Permendesa 13/2020 setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan

11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa.

Adapun 10 SDGs dimaksud dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 adalah :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat sejahtera
4. Keterlibatan perempuan desa
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan

6. Pertumbuhan ekonomi desa merata
7. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
8. Desa damai berkeadilan
9. Kemitraan untuk pembangunan desa, dan
10. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Terdapat 17 (tujuh belas) tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa, yaitu :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (*No Poverty*).
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan (*Zero Hunger*).
3. Menjamin hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia (*Good Health and Well Being*).
4. Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup (*Quality Education*).
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan (*Gender Equality*).
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (*Clean Water and Sanitation*).
7. Memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua (*Affordable and Clean Energy*).

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (*Decent Work and Economic Growth*).
9. Membangun infrastruktur yang tahan banting, mendorong industrialisasi yang inklusif dan keberlanjutan, serta mendorong inovasi (*Industry, Innovation, and Infrastructure*).
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara (*Reduced Inequalities*).
11. Menjadikan kota dan pemukiman aman, tangguh, inklusif, dan keberlanjutan (*Sustainable Cities and Communities*).
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (*Responsible Consumption and Production*).
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (*Climate Action*).
14. Melestarikan dan secara berkelanjutan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan (*Life Below Water*).
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi pengundulan gunung, dan menghentikan serta mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati (*Life On Land*).
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan (*Peace, Justice and Strong Institutions*).

17. Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan keberlanjutan (*Partnership for The Goals*).

Pulau Sumatera adalah salah satu pulau yang terbesar diantara beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia, pulau ini mempunyai posisi yang cukup strategis untuk dikembangkan khususnya di Sumatera Utara. Dengan melihat kondisi yang serba mendukung maka pengelola kekayaan alam itu perlu untuk diamplikasikan dengan cepat. Sumatera utara merupakan provinsi keempat yang terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengangkat daerah yang tertinggal menjadi daerah yang maju.

Salah satu provinsi yang mendapatkan anggaran transfer daerah dan dana desa ialah provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki ibukota provinsi terbesar ke 4 di Indonesia yaitu kota Medan, provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas pesisir timur, pegunungan bukit barisan, pesisir barat, kepulauan Nias. Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk Sumatera Utara mencapai 14.562.549 juta jiwa, yang terdiri dari 7.266.207 juta jiwa penduduk laki-laki, dan 7.296.342 juta jiwa penduduk perempuan. Selain itu provinsi Sumatera Utara memiliki 33 kabupaten/kota, serta memiliki 450 kecamatan dan 5.417 desa. Data tersebut diambil dari BPS. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2019 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 801.733,34 miliar dan PDRB per kapita mencapai Rp 55,05 juta. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2019 tumbuh 5,22 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,18 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,63 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen PK-LNPRT sebesar 9,95 persen.

Berdasarkan Data yang dilansir oleh Dirjen Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara pertama sekali menerima Dana Desa sebesar Rp 1,46 triliun pada tahun 2015. Jumlah Dana Desa tersebut terus meningkat secara fantastis hingga mencapai Rp. 4,45 triliun pada tahun 2019. Secara rinci dalam paparan Kemenkeu Tahun 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 4,5 triliun untuk 5.417 desa. Dan mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 7.915.875.054.000 (dalam ribuan). Antara lain, terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.406.297.261.000(dalam ribuan), Dana Alokasi Khusus fisik (DAK) Rp.498.388.442.000(dalam ribuan), dan Dana Alokasi Khusus Non fisik Rp.4.247.821.553.000(dalam ribuan).

Tabel 1.2
Pengalokasian Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021

Nama Daerah	Jumlah Desa	Dana Desa (dalam ribuan rupiah)		
		2019	2020	2021
Kab. Asahan	177	146.090.415	150.506.325	152.083.710
Kab. Dairi	161	127.172.564	130.304.470	129.738.730
Kab. Deli Serdang	380	306.386.948	312.277.329	312.546.966
Kab. Karo	259	197.078.926	201.208.286	198.409.273
Kab. Labuhan Batu	75	70.226.102	72.182.696	74.477.417
Kab. Langkat	240	205.446.268	211.213.265	213.259.749
Kab. Mandailing Natal	377	285.841.420	290.920.103	286.845.864
Kab. Nias	170	180.585.127	181.381.215	179.544.025
Kab. Simalungun	386	294.442.204	298.689.733	296.800.840
Kab. Tapanuli Selatan	211	167.751.279	172.034.790	169.754.513
Kab. Tapanuli Tengah	159	140.541.973	144.349.335	142.631.022
Kab. Tapanuli Utara	241	184.186.164	194.621.304	192.016.817
Kab. Toba Samosir	231	176.101.238	179.571.269	177.074.852
Kab. Pakpak Bharat	52	48.298.630	50.424.120	50.970.983
Kab. Nias Selatan	459	348.422.333	356.099.164	351.138.751
Kab. Humbang Hasundutan	153	123.336.297	126.028.454	124.934.505
Kab. Serdang Bedagai	237	184.774.302	187.834.594	185.739.448
Kab. Samosir	128	108.744.499	109.313.044	107.929.748
Kab. Batu Bara	141	118.843.171	121.634.028	121.071.737
Kab. Padang Lawas	303	230.097.858	233.549.721	230.275.200
Kab. Padang Lawas Utara	386	287.244.660	293.516.929	289.345.427
Kab. Labuhan Batu Selatan	52	61.548.371	65.076.224	67.788.110
Kab. Labuhan Batu Utara	82	79.123.527	83.576.158	86.022.841
Kab. Nias Utara	112	137.008.319	137.596.573	136.386.189
Kab. Nias Barat	105	114.000.248	118.531.988	117.397.253

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020 (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang menerima anggaran dana desa tahun 2021 terbesar berturut-turut adalah Kabupaten Nias Selatan (Rp.304.227.954), Kabupaten Deli Serdang (Rp.251.866.280), Kabupaten Simalungun (Rp.255.843.116), Kabupaten Padang Lawas Utara (Rp. 255.843.116), dan Kabupaten Mandailing Natal (Rp. 249.877.862). Menarik untuk diamati karena dari kelima daerah tersebut Kabupaten Nias Selatan

menerima alokasi dana desa terbesar padahal Nias Selatan merupakan Kabupaten kecil dengan jumlah penduduk paling sedikit setelah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata menjadi penting sebagai penyumbang devisa andalan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Peran sektor pariwisata makin penting dalam Perekonomian Sumatera Utara, baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dalam rancangan pembangunan nasional, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga pengembangan pariwisata harus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperluas dan memanfaatkan sumber serta potensi pariwisata di Sumatera Utara sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, khususnya masyarakat sekitarnya untuk merangsang pembangunan regional, memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa.

Salah satu potensi terbesar sektor pariwisata Sumatera Utara yaitu Danau Toba. Danau Toba adalah danau kaldera terbesar di dunia yang terletak di provinsi Sumatra Utara, berjarak 176 km kearah barat kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia dan juga merupakan sebuah kaldera volcano-tektonik (kawah gunung api raksasa) kuarter terbesar di dunia. Sebagai danau volcano tektonik terbesar didunia, Danau Toba

memiliki Panjang 100 kilometer (62 mil), lebar 30 kilometer (mil) dengan ketinggian 905 meter diatas permukaan laut(dpl) dan kedalaman danau yang terdalam 505 meter.(Wikipedia)

Bak magnet yang terus-menerus menyedot perhatian dunia, Danau Toba bukan hanya menarik perhatian para turis mancanegara. Para pakar bidang pergunungapian pun tak bosan-bosannya bolak-balik ke kawasan itu demi menguak misteri yang masih tersembunyi. Kekuatan magnet Danau Toba kian nyata ketika Dewan Eksekutif UNESCO dalam sidangnya yang ke-209 di Paris, Prancis, Selasa (2/7/2020), menetapkan kaldera Toba sebagai Global Geopark atau menjadi warisan dunia yang harus dijaga dengan baik.

UNESCO menilai, kaldera Toba memiliki kaitan geologis dan warisan tradisi yang tinggi dengan masyarakat lokal khususnya dalam hal budaya dan keanekaragaman hayati. Dalam konteks inilah, negara anggota UNESCO mendukung kaldera Toba dilestarikan dan dilindungi sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Penetapan kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark memberikan kesempatan dan sekaligus juga tanggung jawab bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat setempat.

Penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark, memberikan kesempatan dan sekaligus tanggung jawab bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat setempat. Penetapan ini dapat mendorong pengembangan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Melalui pengembangan geo-pariwisata yang berkelanjutan, terbuka peluang bagi masyarakat setempat untuk promosi budaya, produk lokal serta penciptaan

lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dengan adanya pengakuan dan perhatian dunia terhadap Kaldera Toba, pemerintah dan masyarakat setempat berkewajiban untuk meningkatkan dan terus menjaga kelestarian lingkungan dan keutuhan dari Kawasan Kaldera Toba. Kaldera Toba, Provinsi Sumatera Utara terbentuk dari ledakan super volkano 74.000 tahun lalu. Dasar Kaldera tersebut dipenuhi dengan air dan menjadi danau terbesar di Indonesia dan menjadi wisata nomor tiga di Indonesia setelah Bali dan Mandalika.

Di Kawasan Kaldera Toba, terdapat 7 wilayah administrasi pemerintahan, yaitu:

1. Kabupaten Samosir
2. Kabupaten Toba Samosir
3. Kabupaten Simalungun
4. Kabupaten Karo
5. Kabupaten Dairi
6. Kabupaten Tapanuli Utara
7. Kabupaten Humbang Hasundutan

Danau Toba merupakan salah satu dari 88 yang termasuk ke dalam Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025, sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan kepariwisataan. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau

memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti lingkungan hidup, atau pertahanan dan keamanan.

Pengembangan Desa wisata di Kawasan Kaldera Toba dinilai bisa memanfaatkan Dana Desa. Apalagi anggaran yang diterima desa terus bertambah setiap tahunnya.

Tabel 1.3
Dana Desa di 7 kabupaten Kawasan Kaldera Toba Tahun 2019-2021

Nama Daerah	Jumlah Desa	Dana Desa (dalam ribuan rupiah)		
		2019	2020	2021
Kabupaten Samosir	128	108.744.499	109.313.044	107.929.748
Kabupaten Toba Samosir	231	176.101.238	179.571.269	177.074.852
Kabupaten Karo	259	197.078.926	201.208.286	198.409.273
Kabupaten Dairi	161	127.172.564	130.304.470	129.738.730
Kabupaten Simalungun	386	294.442.204	298.689.733	296.800.840
Kabupaten Tapanuli Utara	241	184.186.164	194.621.304	192.016.817
Kabupaten Humbang Hasundutan	153	123.336.297	126.028.454	124.934.505

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020 (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Dilihat dari tabel (1.3), bahwa Anggaran Dana Desa terbesar berada pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2021 Anggaran Dana Desa mengalami penurunan. Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba yang mendapatkan Anggaran Dana Desa terbesar yaitu Kabupaten Simalungun dengan jumlah desa sebanyak 386 desa. Dan Kabupaten yang mendapatkan Anggaran Dana Desa terendah di Kawasan Kaldera Toba yaitu Kabupaten Samosir dengan jumlah desa sebanyak 128 desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya di Kawasan Kaldera Toba, Pemberian Dana desa diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam mengembangkan desa, meningkatkan pembangunan ekonomi serta meningkatkan perekonomian daerah terutama di Kawasan Kaldera Toba melalui pengembangan geo-pariwisata yang berkelanjutan dan dapat menjadikan masyarakat sejahtera.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu ***“Kebijakan Dana Desa ; Implementasi Penurunan Ketimpangan Ekonomi Desa-Kota untuk Peningkatan Ekonomi Pada Kawasan Kaldera Toba Sumatera Utara”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka didapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,yaitu:

1. Pengelolaan Dana Desa belum di manfaatkan dengan benar untuk Pembangunan desa.
2. Tidak efektif dalam mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk membangun infrastruktur pada wilayah pedesaan.
3. Perbedaan karakteristik suatu desa mengindikasikan bahwa Alokasi Dana Desa yang dibagikan secara merata tidak digunakan dengan benar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

4. Pelaksanaan Program Dana Desa masih belum merata di setiap desa sehingga terhambatnya keberlanjutan pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi.
5. Aparatur Pemerintahan Desa tidak terbuka dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas pengelolaan keuangan.
6. Banyaknya Alokasi Dana Desa yang diterima kurang dimanfaatkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
7. Minimnya aksesibilitas masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam produktifitas sumber daya manusia.
8. Kurang efektif memanfaatkan sektor pariwisata sebagai hasil pendapatan daerah.
9. Infrastruktur yang kurang memadai membuat wisatawan kurang berminat untuk datang ke kawasan wisata kaldera toba.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada masalah Pengelolaan Dana Desa di Desa yang menjadi tujuan wisata yang berada di pinggir Danau Toba.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan indikator sosial dan ekonomi pada 7 kabupaten di Kawasan Kaldera Toba?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa pada Desa wisata di Kawasan Kaldera Toba?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Melakukan Analisa Ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan indikator sosial dan ekonomi pada desa yang menjadi tujuan wisata yang berada di pinggir Danau Toba.
2. Melakukan Analisa efisiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Desa pada Desa wisata yang berada di pinggir Danau Toba.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Akademik

1. Bagi Peneliti
 - a) Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ekonomi Pembangunan.
 - b) Sebagai bekal pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di perkuliahan ke dalam karya nyata.
2. Bagi Mahasiswa

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dan gambaran bagi mahasiswa tentang Pengelolaan dana desa sebagai implementasi ketimpangan ekonomi desa dengan kota dalam meningkatkan perekonomian di wilayah kawasan Kaldera Toba, terutama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.6.2 Manfaat Non-Akademik

- 1) Bagi Pemerintahan Kabupaten yang berada di kawasan Kaldera Toba untuk pengambilan kebijakan Dana Desa.
- 2) Penelitian ini dapat sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2010:36).

Secara fiknitif, pendapatan nasional merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara, dalam kurun waktu tertentu, prinsip ini mewakili konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross domestic Product* (GDP) dan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP).

Pendapatan Nasional secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah. Pendapatan nasional yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro, merupakan variabel penting guna mencari hubungan di antara variabel-variabel lain dalam ekonomi makro. Perubahan di dalam variabel pendapatan nasional mempunyai pengaruh terhadap variabel yang lain. Pendapatan Nasional di anggap pilar utama penyangga Politik Ekonomi artinya kearah Pendapatan Nasional itulah hampir semua kebijakan di bidang perekonomian difokuskan.

Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang

diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai (Sukirno,2008).

Metode perhitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah atau besar dari nilai pendapatan nasional tersebut. Selain untuk mengetahui jumlah pendapatan nasional suatu negara, metode perhitungan pendapatan nasional juga bisa dijadikan alat evaluasi. Di mana, Negara bisa menilai dan mengevaluasi kinerja para sumber daya manusianya dan mengukur produktivitas negaranya.

Terdapat 3 (tiga) metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi (*Production Approach*), pendekatan pengeluaran (*Expenditure Approach*), dan pendekatan pendapatan (*Income Approach*).

a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Menurut pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif. Cara ini menghasilkan *Gross National Product* atau GNP. Perhitungan dalam pendapatan nasional hanyalah nilai tambah (value added) dari masing-masing lapangan usaha/sektor-sektor ekonomi yang dihasilkan pada berbagai tahapan proses produksi. Dimana nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi dan nilai biaya yang dikeluarkan, yang terdiri atas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.

Pendapatan produksi terbagi menjadi 9 sektor utama, yaitu :

- 1) Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
- 2) Sektor pertambangan
- 3) Sektor industri
- 4) Sektor listrik, gas dan air bersih
- 5) Sektor konstruksi
- 6) Sektor perdagangan, hotel dan restoran
- 7) Sektor pengangkutan dan komunikasi
- 8) Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- 9) Sektor jasa lainnya.

Rumus pendapatan nasional untuk pendekatan produksi :

$$Y = \sum P_n \cdot Q_n \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana :

Y = pendapatan nasional

P_n = harga jual produk jadi

Q_n = jumlah produk diproduksi

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan pendapatan (*income approach*) adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau satu tahun. Yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian/kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda, misalnya:

- Tenaga kerja dapat memperoleh gaji/upah
- Pemilik modal akan mendapat bunga
- Pemilik tanah dapat memperoleh sewa
- Keahlian atau skill dapat memperoleh laba

Rumus pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut:

$$Y = r + w + i + p \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana :

Y = Pendapatan Nasional

r = Upah/gaji

w = Sewa

i = Bunga

p = Laba Usaha

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran sektor-sektor yang terlibat dalam perekonomian atau menjumlahkan pengeluaran dari masyarakat kedalam barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Masing-masing sektor perekonomian yaitu :

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C)
- 2) Pengeluaran Investasi (I)
- 3) Pengeluaran konsumsi Pemerintah (G)
- 4) Ekspor netto (X-M)

$$Y = C + I + G + (X-M) \dots\dots\dots (2.3)$$

Keterangan :

- Y = Pendapatan nasional
- C = Konsumsi rumah tangga
- I = Investasi
- G = Pengeluaran Pemerintah
- X = Ekspor
- M = Impor

Dengan menggunakan 3 metode pendekatan pendapatan nasional yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran dapat membantu suatu negara untuk menentukan jumlah atau besarnya pendapatan nasional. Karena besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara menentukan maju dan berkembangnya suatu negara karena berhubungan dengan laju perekonomian negara.

Adapun komponen pendapatan nasional yaitu :

- a) *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu Negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di Wilayah Negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor.
- b) *Gross National Product* (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) adalah nilai seluruh produk yang diproduksi seluruh masyarakat nasional di dalam dan di luar negeri pada periode tertentu.
- c) *Net National Product* (NNP) atau Produk Nasional Netto (PNN) adalah nilai GNP yang berubah karena penyusutan harga barang-barang modal.
- d) *National Income* (NI) atau Pendapatan Nasional (PN) adalah pendapatan agregat yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi. Pendapatan nasional mengukur pendapatan agregat yang diterima oleh faktor-faktor produksi sebelum pajak (*direct taxes*) dan pembayaran transfer (*transfer payment*).
- e) *Personal Income* (PI) atau Pendapatan Perseorangan (PP) adalah nilai NI yang dikurangi jaminan sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan, dan ditambah pembayaran pindahan (*transfer payment*). Pembayaran pindahan adalah tunjangan yang diberikan Negara kepada individu untuk mensejahterakan masyarakat dan menambah pendapatan seseorang.

f) *Disposable Income* (DI) atau Pendapatan Bebas (PB) adalah jumlah pendapatan yang secara aktual tersedia bagi rumah tangga yang siap untuk dibelanjakan atau digunakan. Pendapatan *Disposable* diperoleh dengan cara Pendapatan Nasional dikurangi Pajak perorangan (*personal taxes*) dan kewajiban-kewajiban bukan pajak (*nontaxes liabilities*).

2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi

Secara umum Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi secara luas didefinisikan sebagai pembangunan yang terjadi melalui proses multidimensional yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam variabel dari perubahan besar yang dimana terjadi dalam sebuah struktur sosial, sikap dari masyarakat, berbagai macam kelembagaan nasional dan juga percepatan dari pertumbuhan ekonomi, dan juga pengurangan serta ketidakmerataan, dan yang terakhir adalah penghapusan dari kemiskinan mutlak dalam Todaro, (2000).

Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dalam Todaro dan Smith ,(2006).

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada

untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru, dimana kesemuanya ini merupakan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah. Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi berisi strategi pembangunan daerah yang dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Pengertian pembangunan dalam hal ini banyak digunakan para pembuat kebijakan sebagai usahanya membangun stabilitas perekonomian negara dalam Jhingan, (2014).

Pembangunan memiliki konsep melalui proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu. Oleh karena itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Upaya pembangunan juga untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin dalam Todaro & Smith, (2011).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi

pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan dalam Todaro & Smith, (2011).

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi: pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*). Kedua, meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia; dan ketiga, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia dalam Todaro, (1999:5).

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses, sosial, ekonomi, dan lembaga yang memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tujuan dalam Todaro & Smith, (2011).

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualisme ekonomi antara desa dan kota. Jika hal

itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan dalam Todaro & Smith, (2011).

A. Teori Aliran Klasik

1. Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith (1723-1790) Bapak dari ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya yaitu teori yang menyelidiki fakto-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations (1776)* yang terkenal dengan buku *Wealth of Nations* yang tema pokoknya mengenai bagaimana perekonomian itu tumbuh. Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi yaitu pertumbuhan output (GNP) total, dan pertumbuhan penduduk. Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori pembangunan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja dalam (Jhingan Pembangunan Ekonomi dan Perancangan hal 81).

Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

a. Hukum Alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur-tangan

pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimumkan kesejahteraan nasional.

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan:

- (1) meningkatnya keterampilan pekerja
- (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang;
- (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga

Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

c. Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. David Ricardo (1772-1823)

Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatasan dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Jhing dan Torado). Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunya berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation (1817)*. melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah “pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan

kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktifitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktifitas maka para pekerja akan menuntut upah tinggi. Teori tersebut memunculkan beberapa asumsi yaitu :

- 1) Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri
- 2) Berlakunya hukum : “ *law of deminishing return* “ bagi tanah
- 3) Persediaan tanah adalah tetap
- 4) Permintaan gandum benar- benar inelastik
- 5) Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel
- 6) Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
- 7) Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
- 8) Harga penawaran buruh adalah tertentu
- 9) Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal
- 10) Terdapat persaingan sempurna
- 11) Pemupukan modal dihasilkan dan keuntungan

Teori David Ricardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan yang signifikan bila mana faktor-faktor produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Richardo mengingat bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi.

3. Teori Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu :

1.1 Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada

tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

1.2 Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut dalam Jhingan, (2010).

4. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (*dicontinuous*) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya dalam Jhingan, (2010). Pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal dalam Jhingan, (2010).

Makna pembangunan ekonomi menurut Schumpeter yang mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang mantap itu terkandung keseimbangan persaingan sempurna. Keseimbangan itu ditandai oleh apa yang menurut istilah Schumpeter disebut “arus sirkuler” yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi selalu berulang dalam suatu alur perekonomian yang tak habis-habisnya. Menurut Schumpeter, arus sirkuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga

buruh dan lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus, dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waduk yang kita sebut dengan pendapatan, untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan dalam Jhingan, (2010).

Schumpeter menggambarkan proses pembangunan kapitalis ini sebagai suatu destruktif kreatif, yang membuat struktur ekonomi masyarakat lama terus-menerus diruntuhkan dan struktur baru terus dibangun di atasnya. Secara singkat, pengusaha merupakan tokoh kunci utama di dalam analisa Schumpeter. Mereka menghasilkan pembangunan ekonomi dalam cara yang spontan dan terputus-putus. Dan gerakan siklis merupakan biaya pembangunan ekonomi dibawah kapitalisme, suatu ciri tetap perjalannya yang dinamis. Penerapan teori Schumpeter pada Negara terbelakang begitu terbatas seperti perbedaan tatanan sosio-ekonomi, kurangnya kewirausahaan, tidak dapat diterapkan pada Negara sosialis, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran, yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi, mengabaikan konsumsi, tabungan, pengaruh eksternal, pertumbuhan dan penduduk. Walaupun demikian, teori Schumpeter menggaris bawahi pentingnya pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi (Jhingan, 2010).

B. Teori Aliran Keynesian

Ekonomi Keynesian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori

ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi *Great Depression*, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laizes-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah dalam Jhingan, (2010).

C. Teori Aliran Neo-Klasik

Teori ini berkembang pada pertengahan tahun 1950-an. Analisis pertumbuhan ekonominya didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Teori ini menyanggah Teori Keynesian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terletak pada tingkat pengeluaran (konsumsi) masyarakat. Menurut teori ini, pertumbuhan terletak pada penawaran (*supply*) faktor produksi dan tingkat produksi. Semakin tinggi tingkat sumber ekonomi dan teknologi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan beberapa

penjelasan mengenai paradigma pembangunan neo-klasik. Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagaiberikut :

1. Neo-klasik merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Menurut neo-klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat tertentu, tingkat bunga menentukan tingginya tingkat investasi.
2. Perkembangan merupakan proses yang gradual. Perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berlangsung terus-menerus.
3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Proses perkembangan meliputi semua faktor yang terlibat untuk tumbuh bersama. Sebagai contoh alat-alat produksi yang tersedia akan memiliki tingkat produktivitas tinggi bila faktor sumber daya manusianya juga mendukung.
4. Aliran neo-klasik merasa optimis terhadap perkembangan. Aliran sebelumnya (klasik) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhambat karena terbatasnya sumber daya alam, sedangkan aliran neo-klasik yakin bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan tersebut.
5. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut. Dengan adanya pasar yang luas, memungkinkan produksi sebesar-besarnya sehingga produktivitas semakin meningkat.

Menurut Teori Neo-Klasik, negara merupakan unit analisis utama, penekanan ini secara implisit menyatakan cara pandang neo-klasik terhadap sejarah yang linear dan suatu asumsi bahwa negara per negara bisa maju dengan usaha sendiri serta berkembang dari keadaan belum maju atau terbelakang menjadi progresif.

Prinsip kunci pandangan neo-klasik tentang pembangunan adalah memaksimalkan keuntungan bagi konsumen dan produsen secara individual, keuntungan bersama yang bisa diperoleh dari perdagangan nasional dan Internasional , serta pencapaian kemajuan ekonomi dan sosial dengan cara mengejar kepentingan pribadi yang senantiasa dicerahkan. Kenyataannya, keuntungan yang diharapkan jarang terpenuhi dan prinsip-prinsip itu sendiri sedikit berhubungan, atau tidak berjalan seiring dengan realitas ekonomi atau realitas sosial. Ini terjadi juga di negara-negara maju, terlebih lagi di negara-negara belum maju. Ketika beberapa negara baru memperoleh kebebasannya (kemerdekaan), pembangunan di bidang ekonomi perlu dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai cara, pendekatan, dan tindakan dilakukan dalam hal kebijakan dan prioritas pembangunan semata-mata dimaksudkan untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

2.1.3 Teori Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu diajukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen pusat dari kebijakan pengeluaran adalah anggaran. Dalam membicarakan penyebab pokok dari pertumbuhan pengeluaran, harus dilakukan pembedaan antara pengeluaran untuk barang dan jasa, dan pengeluaran untuk transfer, karena adanya faktor-faktor yang agak berbeda dalam Musgrave & B Musgrave, (1993).

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan

nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya sedangkan dana yang diterima dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun Teori Pengeluaran Negara sebagai berikut :

1. Musgrave dan Rostow

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

2. Wagner

Wagner mengemukakan sebuah teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan sebutan hukum Wagner, yaitu semakin besar terhadap GNP. Menurut Wagner, jika dalam suatu perekonomian

pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, dan sebagainya.

3. Peacock dan Wiseman

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.

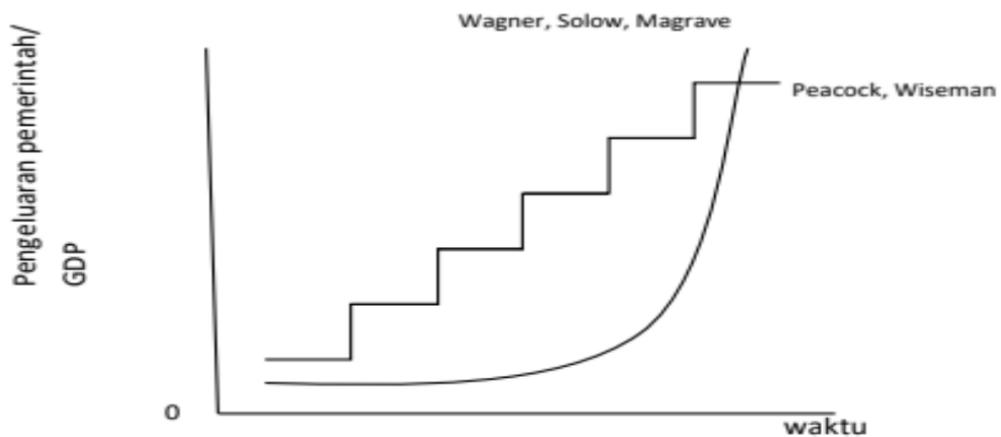
Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut. Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala. Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai.

Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelumperang.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak dalam Mangkoesebroto (1993; 173).

Gambar 2.1

Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



2.1.4 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Zaini Ibrahim, “Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik.

Adapun instrument dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

1. Belanja/pengeluaran negara ($G = \text{government expenditure}$)

2. Perpajakan ($T = taxes$)

Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka :

1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha
2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi
3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, Kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due, yaitu :

- 1) Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
- 2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
- 3) Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Kebijakan fiskal Ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan Ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi.
- 2) Kebijakan Fiskal Kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu :

1. Pembiayaan fungsional (*The functional finance*)

Pembiayaan Fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional ini, yaitu:

- a) Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur sektor swasta (*private sector*).
- b) Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk mendanai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.

c) Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak cepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri bentuk percetakan uang.

2. Pendekatan anggaran terkendali (*the managed budget approach*)

Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.

Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu di jaga. Kemudian untuk menghindari atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3. Stabilitas anggaran (*the stabilizing budget*)

“Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program”. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.

Dalam stabilitas anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, berdasarkan stabilitas perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Sedangkan pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.

4. Pendekatan anggaran belanja berimbang (*balance budget approach*)

Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang.

Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga pemerintah tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun keluar negeri.

Indikator Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat (khususnya permintaan swasta).

“Indikator yang biasa dipakai (meskipun kadangkala menyesatkan) untuk kebijakan fiskal ini adalah budget defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan (terutama dari pajak)”.

2.2 Regulasi atau Kebijakan

2.2.1 Desentralisasi Fiskal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam Rochjadi, (2004).

Dalam teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgrave terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (sentralisasi) ataukah didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah eksternalitas dan uang, yang kedua ialah preferensi dalam Azwardi & Abukosim, (2007).

Selanjutnya Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer, dan pinjaman

daerah yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dalam Azwardi & Abukosim, (2007).

Pada dasarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Adapun tujuan dari transfer ini adalah pemerataan vertikal (*vertical equalization*), pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (*correcting spatial externalities*), mengarahkan prioritas (*redirecting priorities*), melakukan eksperimen dengan ide- ide baru, stabilisasi dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) di setiap daerah dalam Hermawan, (2007).

Di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

2.2.2 Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. (www.Kemendes.go.id).

A. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;

2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindah bukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh Pemda diteruskan ke masing - masing Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD;
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50%. Capaian *output* paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

Penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2018. Untuk tahun 2017, ditentukan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya untuk Tahap II disampaikan ke KPPN.

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

B. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

a. Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

b. Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

c. Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBD Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

a. Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

b. Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan ;dan
2. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desadisusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (www.Kemendes.go.id).

2.3 Penelitian Terdahulu

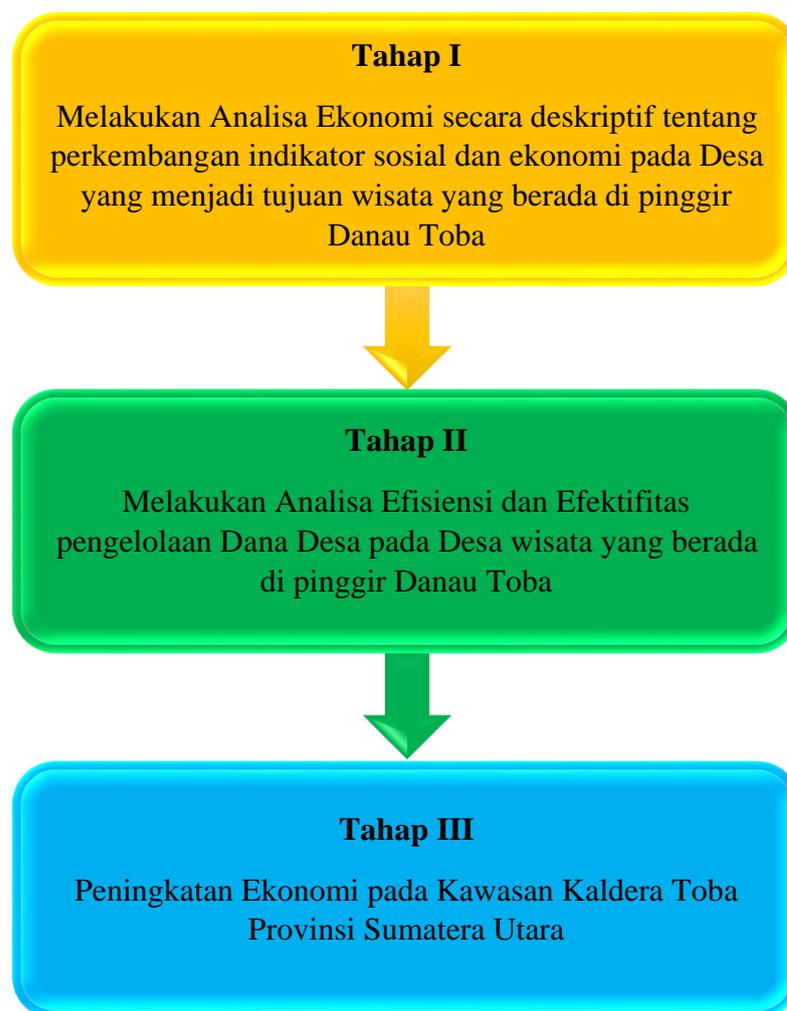
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian & Nama Peneliti	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Kabupaten Deli Serdang Muhammad Fachrurozy Abdillah (2017)	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Dana desa • Pembangunan ekonomi • Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur 	Kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan, kebijakan dana desa memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana baru.
2.	Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang Rahayu (2017)	OLS	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa • Indeks Pembangunan Manusia • Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur 	Perkembangan infrastruktur desa setelah adanya Dana Desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui Pengelolaan Dana Desa
3.	Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Azwardi (2014)	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Rincian Penyaluran ADD • Indeks Kualitas Manusia 	Penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terjadinya ketimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD
4.	Analisis Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia • Jumlah Penduduk Miskin 	Hasil menunjukkan dana desa dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan, mengingat

			<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Desa 	keberagaman desa sangat besar antar daerah, bahkan didalam satu wilayah provinsi
	Handra (2017)			

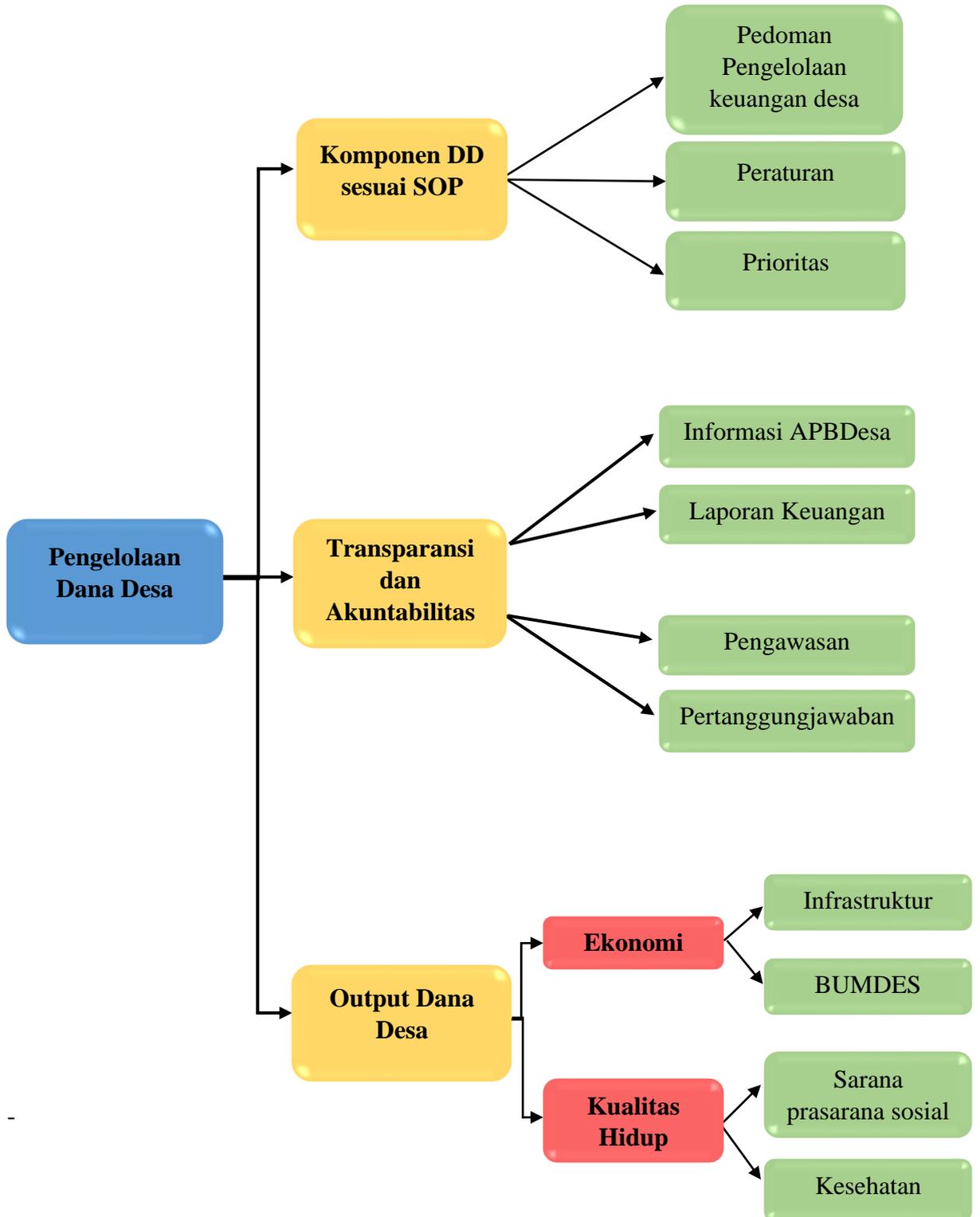
2.4 Kerangka Penelitian

2.4.1 Bagan Tahapan Penelitian



Gambar 2.2 Bagan Alur Penelitian

2.4.2 Model Analisa Faktor



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Model Analisis Faktor

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dan sebuah penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian terapan yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Berdasarkan metode, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping mengukur kekuatan hubungannya(Kuncoro, 2013).

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dalam Moleong, (2012:11). Data yang akan diteliti adalah 7 Kabupaten di Kawasan Wisata Kaldera Toba dan waktu penelitian yang dihimpun adalah pada tahun 2018 sampai 2021 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata, dan Badan Pusat Statistik.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Definisi Operasional

No.	Variabel Laten	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
1.	Pengelolaan Dana Desa	Perencanaan	Proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.	Kementerian Desa PDPT www.kemendesa.go.id
		Pelaksanaan	Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara terperinci.	
		Pelaporan	Salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	
		Pertanggungjawaban	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun.	

2.	Komponen DD sesuai SOP	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Keseluruhan hal atau pokok yang menjadi dasar, acuan, atau petunjuk untuk melaksanakan kegiatan keuangan desa.	Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id
		Peraturan	Tata tertib yang merupakan sesuatu hal yang telah disepakati yang didalamnya ada sanksi bagi yang melanggar.	
3.	Transparan &	Informasi APBDesa	Sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami tentang APBDesa.	Kementerian Desa PDPTT www.kemendesa.go.id
		Laporan Keuangan	Catatan informasi keuangan suatu pemerintahan pada suatu periode untuk menggambarkan hasil kinerja tersebut.	
	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban	Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.	
		Pengendalian sumber daya	Pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja agar rencana-rencana yang telah dibuat dapat terlaksana.	
4.	Output Dana Desa	Ekonomi	Sarana fisik maupun non-fisik yang dibangun oleh pemerintahan desa untuk menunjang perekonomian masyarakat.	Kementerian Desa PDPTT www.kemendesa.go.id
		Kualitas Hidup	Suatu penilaian atas kesejahteraan atau ketiadaanya yang mencakup seluruh aspek emosi, sosial, dan fisik dalam kehidupan individu.	

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat pengelolaan Dana Desa pada 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba Sumatera Utara. Pada periode 2020 sampai 2021 yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id , Kementerian Keuangan (Kemenkeu) www.kemenkeu.go.id , dan Kementerian Desa PDTT (Kemendesa) www.kemendesa.go.id

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 5 bulan yaitu Maret 2021 sampai Juli 2021.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penulisan penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala *numeric*, sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala *numeric*. Pada umumnya data kualitatif yang bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat yang dibedakan menjadi data *interval* dengan data *rasio*.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan

metode pengumpulan data orisinal (Kuncoro, 2013). Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini Populasinya yaitu Pemerintahan Desa yang berada pada desa wisata di pinggir Danau Toba.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah suatu himpunan (*subset*) dari unit populasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah *NonProbability Sampling*, karena tidak ada upaya untuk melakukan generalisasi berdasarkan sampel dengan desain sampel semacam ini, masalah representasi (keterwakilan) tidak dipersoalkan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data melalui website-website resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), yang berupa data silang tempat (*cross section*) dengan objek penelitian 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba dan juga data runtut waktu (*time series*). Kemudian penelitian kepustakaan

(*library research*) juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat menunjang dan dapat digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji literatur-literatur yang tersedia seperti buku, jurnal, dan artikel yang menyangkut Pengelolaan Dana Desa dan Peningkatan Perekonomian Daerah. Melakukan observasi lapangan, serta teknik dengan membagikan kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan kepada responden secara langsung.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan indikator sosial dan ekonomi pada desa yang menjadi tujuan wisata yang berada dipinggir danau toba, dan juga untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Desa pada desa wisata yang berada dipinggir Danau Toba serta mengukur Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada desa wisata yang berada di pinggir Danau Toba.

3.7.2 Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan seberapa cermat suatu alat melakukan fungsi ukurnya atau suatu alat ukur yang dapat mengukur apa saja yang ingin diukurnya. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Validitas berhubungan dengan apakah suatu variabel mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi atau arti sebenarnya yang diukur dalam Sitinjak & Sugiarto, (2006:70).

3.7.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan konsisten suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama dalam Husein Umar, (2000 : 194).

Menurut Muh Nazir terdapat tiga aspek pengertian mengenai reliabilitas. Pertama, suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat tersebut stabil, dapat diandalkan (*dependability*), dan dapat diramalkan (*Predictability*). Kedua, alat ukur tersebut memberikan aspek ketepatan dan akurasi yaitu ukuran yang cocok dengan yang ingin diukur (cermat dan tepat). Ketiga, alat ukur harus sedemikian rupa sifatnya, sehingga *error* pengukuran yang terjadi dapat ditolerir.

3.7 Analisa Faktor

Analisa faktor merupakan metode analisis multivariat yang didasarkan pada korelasi antar variabel. Analisa faktor termasuk salah satu teknik statistika yang dapat digunakan untuk memberikan deskripsi yang relatif sederhana melalui reduksi jumlah variabel yang disebut faktor.

Analisa faktor merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mereduksi dan meringkas data. Analisa faktor dalam analisis multivariate tergolong analisis interdependensi (*interdependence technique*) dimana seluruh set hubungan yang interdependen diteliti. Variabel yang berada dalam satu kelompok akan memiliki korelasi yang tinggi sedangkan variabel yang berbeda kelompok akan memiliki korelasi yang rendah.

Analisis faktor dipergunakan dalam kondisi sebagai berikut :

1. Mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari (*underlying dimensions*) atau faktor, yang menjelaskan korelasi antara suatu set variabel.
2. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak berkorelasi (*independent*) yang lebih sedikit jumlahnya.
3. Menggantikan suatu set variabel asli yang saling berkorelasi di dalam analisis multivariat selanjutnya.
4. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan dalam analisis multivariat selanjutnya.

Jika vektor acak (*random vector*) $X = X_1, X_2, X_3, \dots, X_p$ mempunyai vektor rata-rata μ dan matriks ragam peragam Σ , secara linear bergantung pada sejumlah faktor yang tidak teramati $F_1, F_2, F_3, \dots, F_m$ yang disebut faktor umum (*common factor*) dan $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_p$ yang disebut faktor khusus (*specific factors*).

Maka model dari analisis faktor adalah :

$$X_1 - \mu_1 = l_{i1} F_1 + l_{i2} F_2 + \dots + l_{im} F_m + \varepsilon_i$$

$$X_2 - \mu_2 = l_{i2} F_1 + l_{i2} F_2 + \dots + l_{im} F_m + \varepsilon_i$$

Dan jika dituliskan kedalam notasi matriks, maka bentuknya sebagai berikut :

$$X_{(px1)} - \mu = l_{(pxm)} F_{(mx1)} + \varepsilon_p$$

Keterangan :

X : vektor variabel asal

μ : vektor rata-rata variabel asal

l : matrik loading faktor

F : vektor faktor bersama

ε : vektor faktor spesifik

Adapun model analisa faktor dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Pengelolaan DD}_i = l_{i1} \text{Komponen DD sesuai SOP}_j + l_{i2} \text{Transparansi\&Akuntabilitas}_j + l_{i3} \text{Output DD}_j + \varepsilon_i$$

Dimana :

Pengelolaan DD	: Vektor variabel asal yang memiliki p komponen pada pengamatan ke- i .
Komponen DD sesuai SOP_j	: Faktor bersama (<i>common factor</i>) yang ke- j .
Transparansi & Akuntabilitas $_j$: Faktor bersama (<i>common factor</i>) yang ke- j .
Output DD	: Faktor bersama (<i>common factor</i>) yang ke- j .
l_{ij}	: Bobot faktor (<i>factor loading</i>) dari peubah ke- i dan faktor ke- j .
ε_i	: Sisaan atau <i>error</i> dari peubah ke- i (<i>specific factor</i>).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

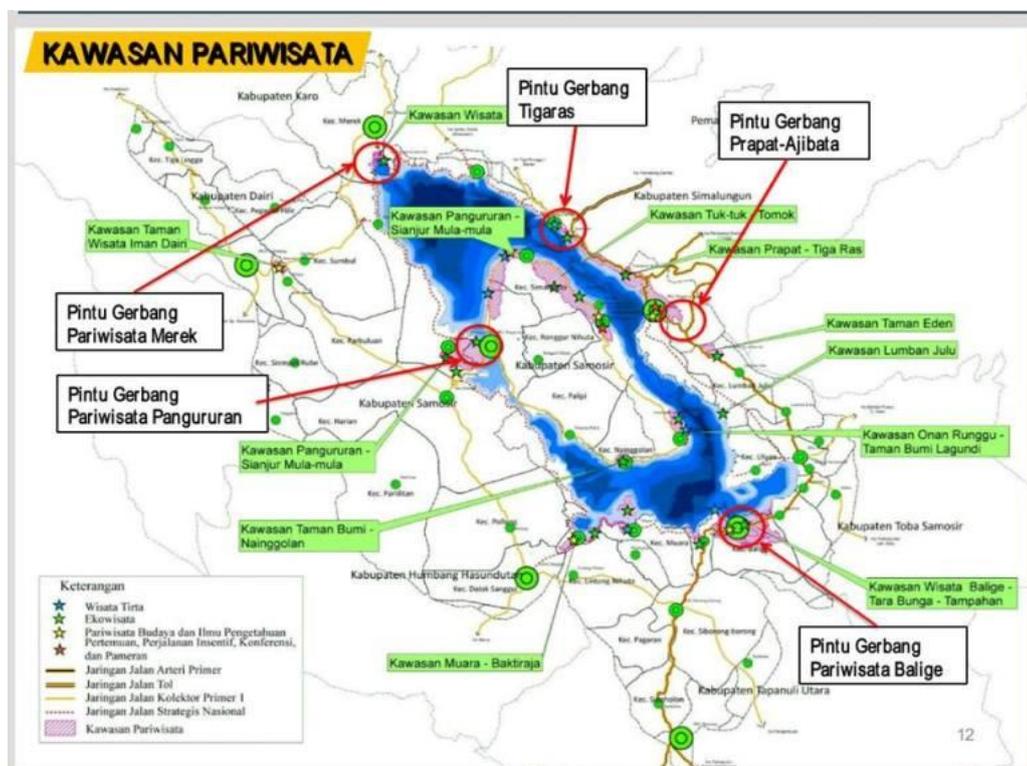
4.1 Gambaran Umum Kawasan Kaldera Toba

4.1.1 Letak Geografis

Geopark Kaldera Toba terletak pada $2,88^{\circ}$ N – $98,52^{\circ}$ E dan $2,35^{\circ}$ N – $99,1^{\circ}$ E, berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara berjarak 176 km ke arah Barat Kota Medan sebagai ibukota Provinsi. Sebagai hasil *Super Volcano*, kawasan ini merupakan kawasan gunung api raksasa (Kaldera volkano-tektunik) yang membentuk danau terluas di Indonesia berukuran sekitar $90 \times 30 \text{ km}^2$ berada pada ketinggian berjarak 904 mdpl dengan kedalaman danau terdalam 505 meter.

Gambar 4.1

Peta Kawasan Kaldera Toba



Sumber : Wikipedia

Secara administratif, Danau Toba dikelilingi oleh 7 wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten, yaitu kabupaten Samosir, kabupaten Toba Samosir, kabupaten Simalungun, kabupaten Karo, kabupaten Dairi, kabupaten Tapanuli Utara, dan kabupaten Humbang Hasundutan yang membagi wilayah perairan Danau Toba.

Tabel 4.1

Luas Daerah Menurut Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba Tahun 2020

No.	Kabupaten	Luas (km ²)	Jumlah Desa
1.	Simalungun	4.369,00	386
2.	Samosir	2.069,05	128
3.	Toba Samosir	2.328,89	231
4.	Karo	2.127,00	259
5.	Dairi	1.927,80	161
6.	Tapanuli Utara	3.791,64	241
7.	Humbang Hasundutan	2.335,35	153
	Kawasan Kaldera Toba	18.948,73	1.559

Sumber : Badan Pusat Statistik (www.Bps.go.id)

Berdasarkan luas daerah menurut Kabupaten di kawasan Kaldera Toba yang memiliki luas terbesar yaitu Kabupaten Simalungun dengan luas 4.369,00 km² dan jumlah desa sebanyak 386 desa, diikuti Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas 3.791,64 km² dan jumlah desa sebanyak 241 desa. Sedangkan luas daerah terkecil yang berada di kawasan Kaldera Toba yaitu Kabupaten Dairi dengan luas 1.927,80 km² dan dengan jumlah desa sebanyak 161 desa, diikuti oleh Kabupaten Samosir dengan luas 2.069,05 km² dengan jumlah desa sebanyak 128 desa.

4.1.2 Iklim

Kondisi iklim (curah hujan, suhu udara, kelembapan udara dan evaporasi) sangat mempengaruhi neraca air danau. Suhu udara dan kelembapan akan menentukan besarnya laju evaporasi dari permukaan danau. Laju evapotranspirasi dari kawasan Danau Toba akan mempengaruhi jumlah air yang mampu di simpan di dalam tanah dan merupakan cadangan pasokan air ke dalam danau selama musim kemarau (periode tidak hujan).

Kondisi iklim dapat berubah sebagai akibat perubahan penutupan lahan dan penggunaan lahan pada kawasan. Peningkatan suhu pada Kawasan dapat meningkatkan suhu udara dan menurunkan kelembapan udara yang akhirnya akan meningkatkan laju evapotranspirasi dari daratan dalam kawasan maupun evaporasi dari permukaan danau. Kondisi iklim juga berpengaruh terhadap upaya pemanfaatan lahan, terutama untuk usaha pertanian, perikanan dan kehutanan. Peningkatan suhu akibat perubahan penggunaan lahan akan dapat merubah pola hujan sehingga akan mempengaruhi masukan air ke dalam danau.

1. Tipe Iklim

Menurut klasifikasi Iklim Oldeman maka Ekosistem Kawasan Danau tersebut termasuk ke dalam tipe B1, C1, C2, D2 dan E2. Dengan demikian, Bulan basah (curah hujan ≥ 200 mm/bulan) berturut-turut pada kawasan ini bervariasi antara kurang dari 3 bulan sampai dengan 7-9 bulan, sedangkan bulan kering (curah hujan ≤ 100 mm/bulan) berturut-turut antara 2-3 bulan. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Scmidth dan Ferguson, maka Ekosistem Kawasan Danau Toba ini termasuk ke dalam tipe iklim A, B dan B.

2. Curah Hujan

Dari tujuh stasiun penakar hujan yang terdapat di Ekosistem kawasan Danau Toba (Parapat, Sidamanik, Situnggaling, Balige, Siborong-borong, Dolok Sanggul dan Panguruan) diketahui bahwa curah hujan tahunan di kawasan Danau Toba berkisar antara 2.200 – 3.000 mm/tahun. Puncak musim hujan terjadi pada bulan November–Desember dengan curah hujan antara 190-320 mm/bulan. Sedangkan puncak musim kemarau terjadi selama bulan Juni-Juli dengan curah hujan berkisar antara 54-151 mm/bulan.

3. Suhu, Kelembaban Udara dan Evaporasi

Suhu Udara bulanan di Ekosistem Kawasan Danau Toba berkisar antara 18-19.7°C di Balige dan antara 20-21.0°C di Sidamanik. Suhu udara selama musim kemarau cenderung agak lebih tinggi dibandingkan dengan selama musim hujan. Sedangkan angka kelembaban tahunannya berkisar antara 79-95%. Pada bulan-bulan musim kemarau kelembaban udara cenderung agak rendah dibandingkan pada bulan-bulan musim hujan. Evaporasi bulanan di Ekosistem kawasan Danau Toba berkisar antara 74-88 mm/bulan. Angka Evaporasi selama musim-musim kemarau cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan musim hujan.

4.1.3 Kondisi Topografi

Kawasan dinding Kaldera Toba memiliki morfologi perbukitan bergelombang sampai terjal dan lembah-lembah membentuk morfologi dataran dengan batas *Caldera rim watershed* Danau Toba seluas daerah 3.658 km² dan luas permukaan danau 1.103 km². Daerah tangkapan air ini berbentuk perbukitan (43%), pegunungan (30%) dengan puncak ketinggian 2.000 mdpl dan dataran (27%) sebagai tempat masyarakat beraktifitas.

Kondisi kelerengan kawasan Kaldera Toba ini dapat digambarkan sebagai berikut :

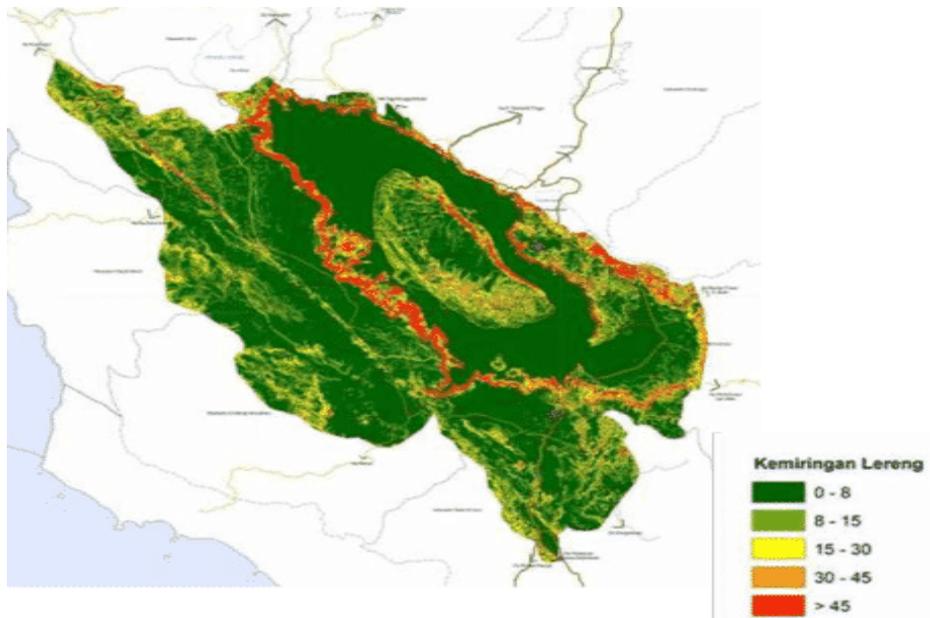
1. Pada bagian utara kawasan Danau Toba yakni wilayah yang merupakan bagian dari Tanah Karo, daerah tangkapan air (DTA) relatif sempit dan memiliki relief bergunung dengan releng terjal. Sedangkan arah tepi danau memiliki relief berombak hingga berbukit yang sebagian digunakan untuk budidaya pertanian. Pada wilayah yang terjal, kemiringannya mencapai >75%. Sedangkan pada daratan yang sempit, kemiringannya < 3%.
2. Ke arah Timur dan Tenggara di daerah Parapat-Porsea-Balige memiliki relief datar hingga bergunung. Di sisi Timur dan Tenggara ke arah batas DTA terdapat dataran yang relatif luas yang digarap oleh masyarakat setempat sebagai lahan sawah. Tepi batas DTA merupakan wilayah berbukit hingga bergunung dengan kemiringan lahan mencapai > 75%.
3. Bagian selatan Kawasan Danau Toba merupakan dataran hingga wilayah berbukit ke arah batas pada daerah yang datar dengan kemiringan lahan <3%, diusahakan oleh masyarakat setempat sebagai lahan pertanian,

sedangkan ke arah batas DTA memiliki kontus relief berbukit hingga bergunung.

4. Di bagian Barat hingga Utara merupakan dataran dan perbukitan hingga bergunung, dengan lereng terjal ke arah tepi danau, seperti di sekitar Tele, Silalahi, dan lereng terjal di wilayah ini mencapai kelerengan $>75\%$.
5. Pulau Samosir memiliki dataran yang relatif luas di sekeliling tepian Danau Toba dengan kemiringan $< 3\%$. Ke arah Tengah pulau reliefnya bergunung dan berlereng terjal dengan kemiringan lahan antara 30,5 hingga $>75\%$. Dataran yang terdapat dibagian Barat dan Selatan pulau ini relatif lebih luas dibanding di sisi Utara dan Timur.

Gambar 4.2

Peta Kondisi Topografi kawasan Kaldera Toba



Sumber : Wikipedia

Kondisi Topografi di kawasan Danau Toba mengakibatkan kawasan ini kurang dapat menyimpan air hujan karena aliran permukaan cenderung tinggi, laju erosi tinggi dan potensi longsor juga tinggi, terutama daerah-daerah yang sangat curam sampai terjal pada tebing-tebing pinggir danau. Rendahnya potensi resapan/menyimpan air kawasan ini telah di indikasikan oleh banyaknya sungai-sungai kecil yang mengalir pada kawasan yang bersifat *intermitten*, dimana sungai-sungai ini mengalir pada waktu hujan dan mengering ketika tidak turun hujan.

Indikasi dari tingginya laju erosi pada kawasan ini adalah dengan banyaknya lahan yang mempunyai lapisan yang sangat tipis terutama pada daerah-daerah perbukitan dengan lereng yang curam, bahkan di beberapa lokasi yang muncul dipermukaan hanya berupa batuan pembentuk tanah tanpa adanya lapisan tanah. Keberadaan semak belukar dan alang-alang/padang rumput yang cukup luas pada kawasan ini juga merupakan indikasi dari tingginya laju erosi sehingga lahan yang telah terbuka sulit untuk dapat membentuk formasi hutan alam kembali karena lapisan tanahnya relatif tipis. Proses pembentukan lapisan tanah secara alamiah yang terjadi tidak mampu mengimbangi proses penipisan lapisan tanah karena proses erosi.

4.2 Demografi

4.2.1. Jumlah Penduduk Kawasan Kaldera Toba

Kawasan Kaldera Toba sebagian besar penduduknya dihuni oleh suku Batak. Berikut jumlah penduduk menurut jenis kelamin di kawasan kaldera toba.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin, Rasio jenis kelamin 7 Kabupaten Kawasan Kaldera Toba (jiwa) 2020

Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Simalungun	497.314	492.932	990.246	100,89
Samosir	67.957	68.484	136.441	99,23
Toba Samosir	102.850	103.349	206.199	99,52
Karo	200.247	204.751	404.998	97,80
Dairi	154.628	154.136	308.764	100,32
Tapanuli Utara	156.176	156.582	312.758	99,74
Humbang Hasundutan	98.958	98.793	197.751	100,17
Kawasan Kaldera Toba	1.278.130	1.279.027	2.557.157	99,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Se-wilayah Kaldera Toba

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kawasan Kaldera Toba pada tahun 2020 tercatat 2.557.157 jiwa dengan rincian 1.278.130 jiwa penduduk laki-laki dan 1.279.027 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada pada Kabupaten Simalungun sebanyak 990.246 jiwa, diikuti dengan Kabupaten Karo yang merupakan kabupaten terlama dengan jumlah penduduk sebanyak 404.998 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada Kabupaten Samosir sebanyak 136.441 jiwa yang merupakan Kabupaten baru pecahan dari Kabupaten Toba Samosir sebelumnya. Rata-rata Rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan di 7 Kabupaten kawasan Kaldera Toba mencapai 99,67 jiwa.

4.2.2 Tenaga Kerja

Tabel 4.3

Jumlah Angkatan Kerja Menurut 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba(jiwa) Tahun 2020

No.	Kabupaten	Jumlah
1.	Simalungun	460.319
2.	Samosir	45.588
3.	Toba Samosir	104.719
4.	Dairi	135.573
5.	Karo	262.029
6.	Tapanuli Utara	172.493
7.	Humbang Hasundutan	112.029
	Kawasan Kaldera Toba	1.292.750

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Se-wilayah Kaldera Toba

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kawasan Kaldera Toba Tahun 2020 sebesar 1.292.750 jiwa. Kabupaten dengan jumlah angkatan kerja terbesar yaitu Kabupaten Simalungun sebesar 460.319 jiwa, diikuti dengan Kabupaten Karo sebesar 262.029 jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan jumlah angkatan kerja paling sedikit yaitu Kabupaten Samosir sebesar 45.588 jiwa dan diikuti oleh Kabupaten Toba Samosir sebesar 104.719 jiwa.

4.3 Kondisi Ekonomi

4.3.1 Nilai PDRB

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan daerah tersebut, terjadinya pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat disebabkan dari meningkatnya kontribusi salah satu subsektor yang ada di daerah tersebut. Berikut ini tabel PDRB menurut Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba.

Tabel 4.4

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 di 7 Kabupaten Kawasan Kaldera Toba(Miliyar Rupiah) Tahun 2020

No.	Kabupaten	PDRB atas dasar harga berlaku	PDRB atas dasar harga konstan
1.	Simalungun	39,44	27,62
2.	Samosir	4,54	3,08
3.	Toba Samosir	7,84	5,48
4.	Dairi	9,32	6,51
5.	Karo	20,97	14,26
6.	Tapanuli Utara	8,27	5,85
7.	Humbang Hasundutan	6,12	4,13
	Kawasan Kaldera Toba	96,5	66,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Se-wilayah Kaldera Toba

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat perekonomian di Kawasan Kaldera Toba yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai Rp.96,5 miliar, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan mencapai Rp.66,93 miliar. Penyumbang PDRB terbesar di Kawasan Kaldera Toba yaitu Kabupaten Simalungun sebesar Rp.39,44 miliar yang di dominasi tiga lapangan usaha yaitu : pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 49,99 persen, perdagangan besar dan eceran dan reperasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,44 persen serta industri pengolahan sebesar 11,54persen. . Peranan ketiga lapangan usaha tersebut mencapai 77,97 persen terhadap total PDRB Simalungun.

Yang kedua yaitu Kabupaten Karo dengan jumlah PDRB sebesar Rp.20,97 miliar yang didominasi oleh Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Kabupaten Karo pada tahun 2020 yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 53,72 persen, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,57 persen, serta konstruksi sebesar 7,42persen.

Dan yang ketiga yaitu Kabupaten Dairi dengan jumlah PDRB sebesar Rp.9,32 miliar yang didominasi oleh Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Kabupaten Dairi pada tahun 2019 yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 42,71 persen, perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,22 persen, serta konstruksi sebesar 13,42 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 55,86 persen, disusul komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 27,66 persen. Sesuai dengan keadaan masyarakat Kabupaten Dairi yang mayoritas bertani, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Dairi.

Sedangkan penyumbang PDRB paling sedikit di Kawasan Kaldera Toba yaitu Kabupaten Samosir sebesar Rp.4,54 miliar yang didominasi Empat kategori utama yang masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Samosir pada tahun 2020 yaitu Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 50,87 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,62 persen, Konstruksi sebesar 11,12 persen serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,84 persen. Peranan keempat kategori tersebut mencapai 84,45 persen terhadap total PDRB Samosir.

Tabel 4.5

Struktur Ekonomi Penyumbang PDRB menurut Lapangan Usaha di Kawasan Kaldera Toba Tahun 2020

No.	Kabupaten	Struktur Ekonomi	Jumlah (%)
1.	Simalungun	• Pertanian, kehutanan, dan perikanan	49,99
		• Perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	16,44
		• Industri pengolahan	11,54
2.	Samosir	• Pertanian, kehutanan, dan perikanan	50,87
		• Administrasi Pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	11,62
		• Kontruksi	11,12
3.	Toba Samosir	• Pertanian, kehutanan, dan perikanan	31,28
		• Perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	18,13
		• Kontruksi	13,43
4.	Dairi	• Pertanian, kehutanan, dan perikanan	42,71
		• Perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor	17,22
		• Kontruksi	13,42
5.	Karo	• Pertanian, kehutanan, dan perikanan	53,72
		• Perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor	10,57
		• Kontruksi	7,42
6.	Tapanuli Utara	• Pertanian, kehutanan, dan perikanan	43,31
		• Perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor	15,68
		• Kontruksi	14,14
7.	Humbang Hasundutan	• Pertanian, kehutanan, dan perikanan	43,67
		• Perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor	15,88
		• Kontruksi	13,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Se-wilayah Kaldera Toba

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa struktur ekonomi penyumbang PDRB terbesar di 7 kabupaten kawasan kaldera toba *All in* di dominasi oleh sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor kontruksi.

Jika dilihat bahwa kawasan kaldera toba merupakan salah satu sektor pariwisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan, seharusnya sektor akomodasi sudah dapat menjadi penyumbang PDRB terbesar untuk kawasan kaldera toba, padahal sektor itu merupakan potensi dan dapat dikembangkan. Pengembangan kawasan kaldera toba sebagai destinasi pariwisata selain ditujukan untuk mendorong upaya konservasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan budaya, juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga wisatawan yang datang tidak hanya melihat danau saja.

Tabel 4.6

Pertumbuhan Ekonomi 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera toba Tahun 2020

No.	Kabupaten	PE (%)
1.	Simalungun	1,01
2.	Samosir	0,59
3.	Toba Samosir	0,27
4.	Dairi	0,94
5.	Karo	0,80
6.	Tapanuli Utara	1,50
7.	Humbang Hasundutan	0,13
	Kawasan Kaldera Toba	0,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Se-wilayah Kaldera Toba

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di 7 kabupaten kawasan kaldera toba tertinggi yaitu berada pada Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 1,50 persen. Ada 13 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, namun ada 4 lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Pengadaan

listrik dan gas merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 9,84 persen, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 8,51 persenserta pertambangan dan penggalian sebesar 5,96 persen. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan memiliki pertumbuhan terkecil yaitu sebesar -3,85 persen. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 mengalami perlambatan jika dibandingkan pada tahun 2019. Perlambatan ini terjadi sebagai dampak pademi global *coronavirus disease 2019* (COVID-19) pada tahun 2020.

Yang kedua diikuti oleh Kabupaten Simalungun dengan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,01 persen. Perekonomian Simalungun tahun 2020 jika dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 1,01 persen. Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi. Berdasarkan pendekatan produksi, kontraksi tertinggi dialami oleh oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi sebesar 5,27 persen, diikuti Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 3,23 persen dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 2,85 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Simalungun tahun 2020, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,69 persen, diikuti diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 0,05 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,02 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi paling rendah berada pada Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0,13 persen. Perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2020 berada pada nilai -0,13 terkontraksi dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 4,94 persen. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi minus dan hal tersebut terjadi juga di 19 kabupaten/kota di

Provinsi Sumatera Utara. Keadaan ekonomi yang mengalami kontraksi utamanya disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid19 selama tahun 2020. Pandemi Covid19 melumpuhkan banyak sektor usaha dan memberikan efek domino kepada perekonomian secara umum. Pembatasan interaksi sosial selama masa pandemi mengakibatkan banyak lapangan usaha mengalami kemandegan bahkan tidak beroperasi. Meskipun demikian tidak terjadi kasus tutupnya usaha selama pandemi Covid19 dikarenakan lapangan usaha di Kabupaten Humbang Hasundutan didominasi sektor informal dengan skala usaha mikro kecil yang hanya memiliki jumlah pekerja sedikit.

Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan 5,25 persen. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Lembaga NonProfit. Sumber pertumbuhan ekonomi utama dari sisi produksi berasal dari Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor. Di sisi pengeluaran, lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan terbesar adalah Konsumsi Rumah tangga.

Tabel 4.7

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba Tahun 2020

No.	Kabupaten	PDRB Perkapita (Rp)
1.	Simalungun	45.248
2.	Samosir	35.852
3.	Toba Samosir	42.524
4.	Dairi	32.639
5.	Karo	49.703
6.	Tapanuli Utara	27.246
7.	Humbang Hasundutan	31.930
	Kawasan Kaldera Toba	37.877

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Se-wilayah Kaldera Toba

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di 7 Kabupaten Kawasan kaldera Toba tertinggi berada pada Kabupaten Karo sebesar 49.703 rupiah, diikuti dengan Kabupaten Simalungun dengan PDRB per kapita sebesar 45.248 rupiah dan Kabupaten Toba Samosir dengan PDRB per kapita sebesar 42.524 rupiah. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku paling rendah yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 31.930 rupiah. Dengan rata-rata PDRB per kapita Kawasan Kaldera Toba sebesar 37.877 rupiah.

Tabel 4.8

Gini Ratio 7 Kabupaten Kawasan Kaldera Toba Tahun 2015 dan 2020

No.	Kabupaten	2015	2020
1.	Simalungun	0,318	0,295
2.	Samosir	0,287	0,318
3.	Toba Samosir	0,328	0,290
4.	Dairi	0,278	0,271
5.	Karo	0,336	0,271
6.	Tapanuli Utara	0,335	0,287
7.	Humbang Hasundutan	0,266	0,246
	Kawasan Kaldera Toba	0,306	0,282

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Se-wilayah Kaldera Toba

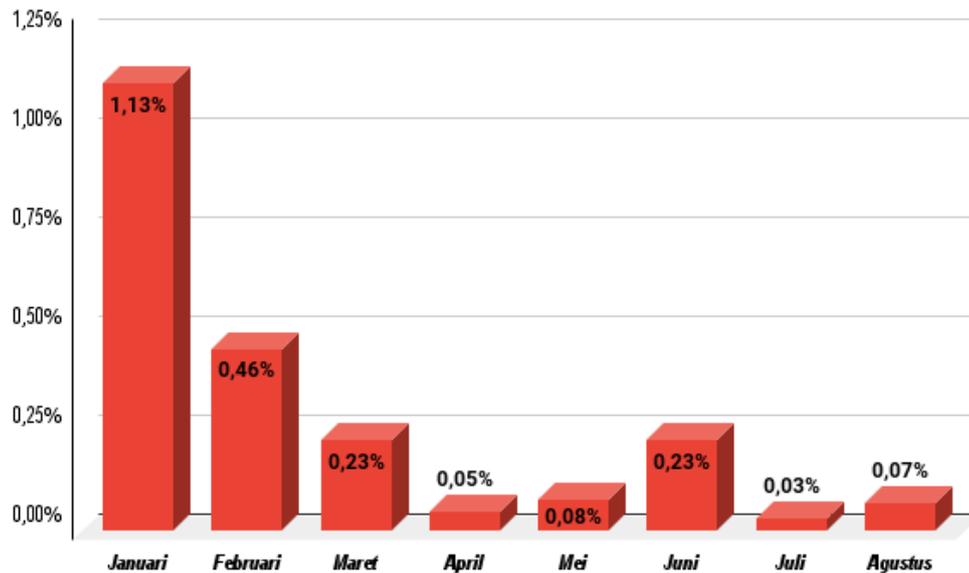
Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa rata-rata *Gini Ratio* dikawasan Kaldera Toba pada tahun 2015 dan 2020 mengalami penurunan. Jika dilihat berdasarkan perkembangan *Gini Ratio* nya, terdapat satu Kabupaten yang mengalami kenaikan *Gini Ratio* yaitu Kabupaten Samosir sebesar 0,287 pada tahun 2015 menjadi 0,318 pada tahun 2020. Ini artinya terjadi kenaikan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Samosir dari tahun 2015 sampai tahun 2020.

Pada tahun 2015 ketimpangan ekonomi tertinggi terjadi di Karo 0,336 dan Tapanuli Utara sebesar 0,335, sementara ketimpangan ekonomi yang paling rendah bahkan mendekati nol (pemerataan sempurna) terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0,266 dan Kabupaten Dairi sebesar 0,278.

Sedangkan pada tahun 2020 ketimpangan ekonomi tertinggi terjadi di Samosir sebesar 0,318 dan Simalungun sebesar 0,295. Sementara ketimpangan ekonomi yang paling rendah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Gambar 4.3

Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar Bulan Januari-Agustus Tahun 2021 (persen)



Sumber : BPS kota Siantar (www.siantarkota.bps.go.id)

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa perkembangan inflasi di Kota Siantar pada bulan Januari sebesar 1,13 persen, kemudian pada bulan Februari Kota Siantar mengalami Deflasi sebesar 0,46 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks pengeluaran kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,41 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25 persen. kemudian pada bulan maret Kota Siantar juga mengalami Deflasi sebesar 0,23 persen, pada bulan April, Mei dan Juni Kota Siantar mengalami kenaikan Inflasi sebesar 0,05 persen pada bulan April, 0,08 persen pada bulan Mei, dan 0,23 persen pada bulan Juni. Sedangkan pada bulan Juli dan Agustus kota Siantar mengalami Deflasi sebesar 0,03 persen dan 0,07 persen.

4.4 Kondisi Sosial

4.4.1 Kemiskinan

Tabel 4.9
Jumlah Penduduk Miskin di 7 Kabupaten Kawasan
Kaldera Toba Tahun 2020

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Property rate (%)
1.	Simalungun	7.364	0,007
2.	Samosir	1.580	0,011
3.	Toba Samosir	2.061	0,009
4.	Dairi	2.293	0,007
5.	Karo	3.657	0,009
6.	Tapanuli Utara	3.320	0,010
7.	Humbang Hasundutan	1.792	0,009
	Kawasan Kaldera Toba	22.067	0,062

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Se-wilayah Kaldera Toba

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di kawasan Kaldera Toba tahun 2020 sebesar 22.067 jiwa atau sebesar 0,062 persen terhadap total penduduk kawasan kaldera toba. Jumlah penduduk miskin terbesar berada pada Kabupaten Simalungun sebanyak 7.364 jiwa diikuti dengan Kabupaten Karo sebanyak 3.657 jiwa dan Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 3.320 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin paling sedikit yaitu Kabupaten Samosir sebesar 1.580 jiwa diikuti dengan Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 1.792 jiwa dan Kabupaten Toba Samosir sebesar 2.061 jiwa.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.356,72 ribu jiwa atau sebesar 9,14 persen terhadap total penduduk. Jumlah penduduk miskin tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada bulan September 2019. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.260,50 ribu jiwa atau sebesar 8,63 persen pada September 2019, terjadi peningkatan jumlah

penduduk miskin sebesar 96,22 ribu jiwa hingga September 2020 dan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,51 poin.

Tabel 4.10

Garis Kemiskinan 7 Kabupaten Kawasan Kaldera Toba Tahun 2020

No.	Kabupaten	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
1.	Simalungun	Rp. 387.549
2.	Samosir	Rp. 341.843
3.	Toba Samosir	Rp. 352.280
4.	Dairi	Rp. 380.275
5.	Karo	Rp. 500.921
6.	Tapanuli Utara	Rp. 324.841
7.	Humbang Hasundutan	Rp. 374.768
	Kawasan Kaldera Toba	Rp. 380.353

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Se-wilayah Kaldera Toba

Berdasarkan tabel 4.10 Garis kemiskinan di Kawasan Kaldera Toba sebesar Rp.380.353,- per kapita perbulan. Garis kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Karo sebesar Rp.500.921,- per kapita perbulan, ini menandakan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Karo sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang berada di Kawasan Kaldera Toba. Garis kemiskinan terendah berada pada Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp.324.841,- per kapita perbulan, ini menandakan bahwa daya beli masyarakat Tapanuli Utara masih sangat rendah dan berada dibawah rata-rata garis kemiskinan Kawasan Kaldera Toba.

Dibandingkan dengan Garis Kemiskinan di Sumatera Utara pada September 2020 sebesar Rp.505.236,- perkapita perbulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.520.529,- perkapita perbulan, dan untuk daerah pedesaan sebesar Rp.486.642,- per kapita perbulan.

Sedangkan Garis Kemiskinan Nasional pada maret 2020 sebesar Rp.454.652,- per kapita perbulan. Dibandingkan September 2019, Garis Kemiskinan Nasional naik sebesar 3,20 persen.

Dengan demikian, Garis kemiskinan di Kawasan Kaldera Toba masih berada dibawah Garis Kemiskinan Nasional yang sebesar Rp.454.652,- per kapita perbulan dan dibawah Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara yang sebesar Rp.505.236,- per kapita perbulan.

4.4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 4.11

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Kaldera Toba Tahun 2015 dan 2020

No.	Kabupaten	2015	2020
1.	Simalungun	71,24	73,25
2.	Samosir	68,43	70,63
3.	Toba Samosir	73,40	74,92
4.	Dairi	69,00	71,42
5.	Karo	72,69	74,43
6.	Tapanuli Utara	71,32	73,47
7.	Humbang Hasundutan	66,03	68,87
	Kawasan Kaldera Toba	70,30	72,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Se-wilayah Kaldera Toba

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Kaldera Toba terus mengalami kemajuan selama periode 2015 dan 2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Kaldera Toba meningkat dari 70,30 pada tahun 2015 menjadi 72,42 pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi berada pada Kabupaten Toba Samosir sebesar 74,92. IPM Toba tumbuh 0,59 persen per tahun. Selama periode 2015 hingga 2020, IPM Toba menunjukkan kemajuan yang besar. Pembangunan manusia Toba masih berstatus “sedang”. Sedangkan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) terendah pada Tahun 2020 di Kawasan Kaldera Toba berada pada Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 68,87. IPM Humbang Hasundutan rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 0,83 persen per tahun dan pencapaiannya masih dalam kategori “sedang”.

Dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2020. IPM Sumatera Utara meningkat dari 67,09 pada tahun 2010 menjadi 71,77 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Sumatera Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,68 persen per tahun. IPM Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang cukup besar, status pembangunan manusia Sumatera Utara mengalami peningkatan. Pembangunan manusia Sumatera Utara telah berstatus “tinggi” mulai tahun 2016.

Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Pada tahun 2020 IPM Indonesia mencapai 71,94, tumbuh sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia di Indonesia masih berada pada level tinggi (berada pada kisaran antara $70 \leq \text{IPM} < 80$). Pertumbuhan IPM tahun 2020 jauh melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,74 persen. Selama periode 2010- 2019, pembangunan manusia di Indonesia setiap tahunnya rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Tetapi dengan pertumbuhan pada tahun 2020 yang melambat tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM 2010-2020 menjadi sebesar 0,78 persen per tahun.

Dengan demikian, pembangunan manusia di kawasan kaldera toba yang berstatus “sedang” masih berada dibawah provinsi Sumatera Utara yang berstatus “tinggi” dan dibawah Nasional yang juga berstatus “tinggi”.

Tabel 4.12
Perkembangan UHH, HLS, Pengeluaran Perkapita di 7 Kabupaten
Kawasan Kaldera Toba Tahun 2015 dan 2020

Kabupaten	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		Pengeluaran Perkapita (juta RP)	
	2015	2020	2015	2020	2015	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
Simalungun	70,34	71,22	13,15	13,28	10.728	11.308
Samosir	70,26	71,27	13,41	13,47	7.698	8.422
Toba Samosir	69,14	70,08	13,18	13,45	11.535	12.375
Dairi	67,78	69,00	12,80	13,10	9.708	10.602
Karo	70,62	71,40	12,22	12,76	11.800	12.349
Tapanuli Utara	67,55	68,63	13,19	13,69	11.079	11.648
Humbang Hasundutan	68,10	69,27	13,15	13,28	6.889	7.850
Kawasan Kaldera Toba	69,11	70,12	13,01	13,29	9.919	10.650

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Se-wilayah Kaldera Toba

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2015 dan 2020, 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba mengalami peningkatan umur harapan hidup saat lahir dengan rata-rata sebesar 0,70 persen per tahun. Pada tahun 2015, umur harapan hidup saat lahir di Kawasan Kaldera Toba sebesar 69,11 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 70,12 tahun.

Sedangkan untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) di 7 Kabupaten Kawasan Kaldera Toba setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Harapan lama sekolah di Kawasan Kaldera Toba telah mencapai 13,01 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 13,29 tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah dan anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikannya hingga Diploma 1.

Dan untuk dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Selama periode tahun 2015 dan tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran per kapita di Kawasan Kaldera Toba sebesar Rp.9.919 juta per tahun, dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.10.650 juta per tahun.

4.5 Analisa Faktor

4.5.1 Deskriptif Data

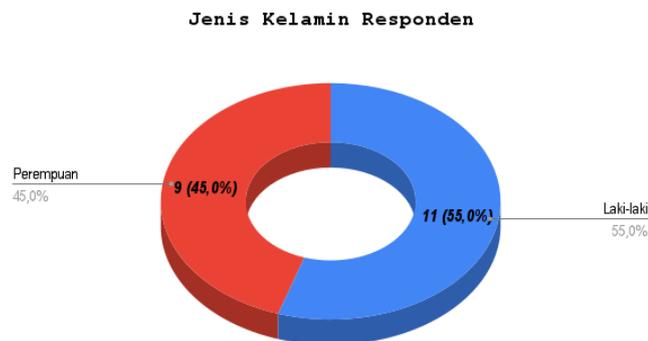
Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada Aparatur Pemerintahan Desa di Kantor Desa Kawasan Kaldera Toba yang berada di pinggiran Danau Toba. Dimana penyebaran kuesioner tersebut dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Jumlah responden yang dipilih yaitu 20 orang dengan *sampling* 7 desa yang berada di kawasan Kaldera Toba.

4.5.2 Deskriptif Profil Responden

Adapun hasil analisis data-data dari profil responden adalah sebagai berikut

:

Gambar 4.4 Jenis Kelamin Responden

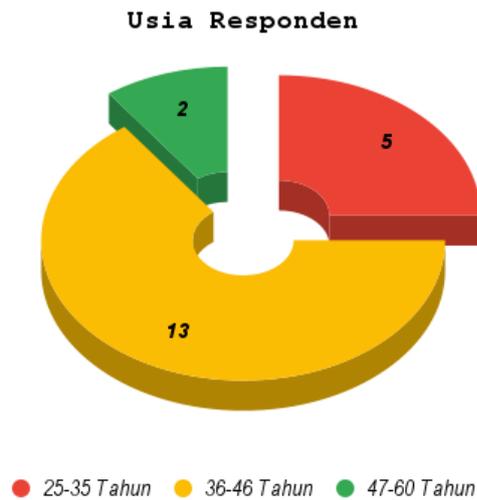


Sumber : Data primer dan diolah

Berdasarkan gambar 4.4 dapat dijelaskan bahwa responden pada penelitian ini terdiri dari 20 orang. Dimana responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 11 orang (55,0%), sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 9 orang (45%).

Maka dapat disimpulkan, bahwa responden menurut jenis kelamin di dominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan yaitu sebanyak 11 orang atau 55% dari keseluruhan sampel.

Gambar 4.5 Usia Responden

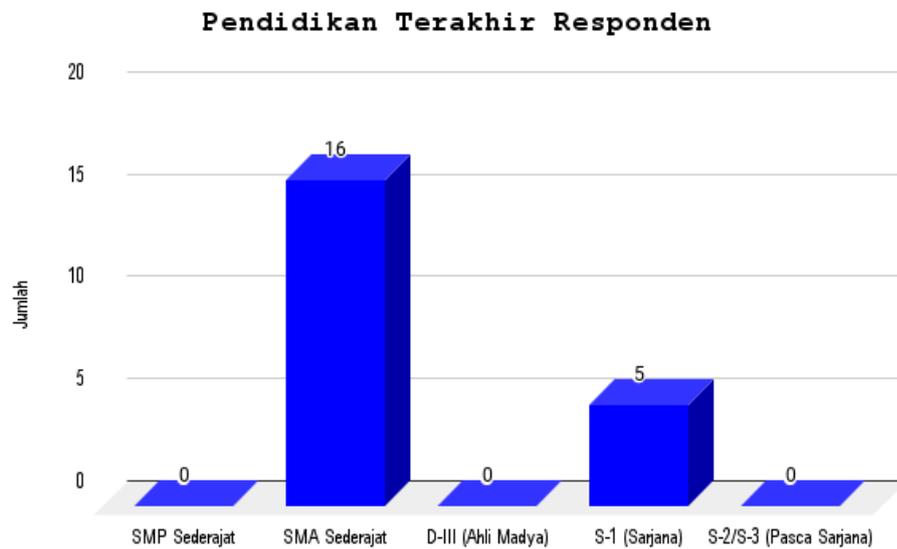


Sumber : Data primer dan diolah

Berdasarkan gambar 4.5 dapat dijelaskan bahwa responden pada penelitian ini terdiri dari 20 orang. Dimana responden pada kelompok usia 23-35 tahun berjumlah 5 orang, kelompok usia 36-46 tahun berjumlah 13 orang, dan kelompok usia 47-60 tahun berjumlah 2 orang.

Maka dapat disimpulkan bahwa responden menurut Usia di dominasi oleh kelompok usia 36-46 tahun sebanyak 13 orang dari keseluruhan sampel.

Gambar 4.6
Tingkat Pendidikan Responden



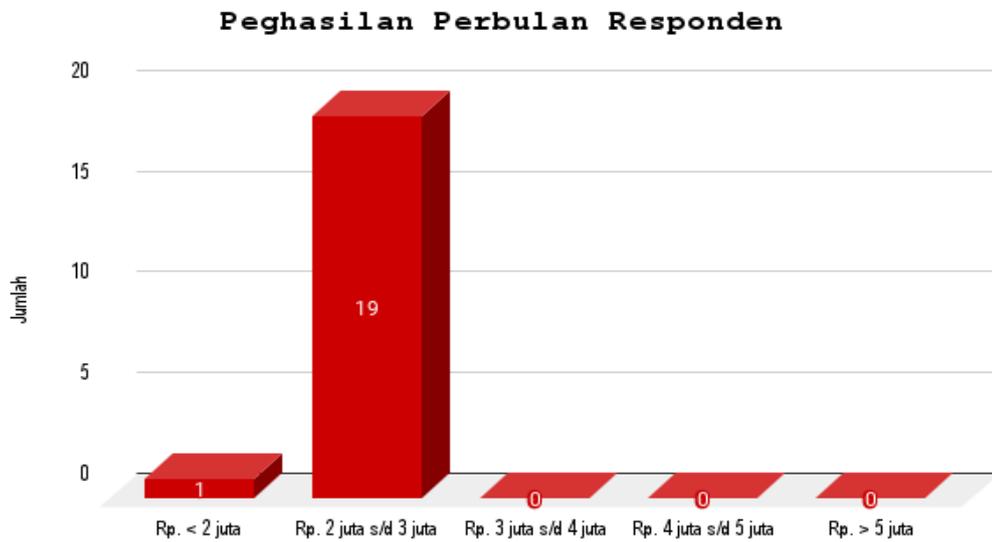
Sumber : Data primer dan diolah

Berdasarkan gambar 4.6 dapat dijelaskan bahwa responden pada penelitian ini terdiri dari 20 orang. Dimana responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat berjumlah 16 orang, dan tingkat pendidikan S-1 (Sarjana) berjumlah 5 orang.

Maka dapat disimpulkan bahwa responden menurut tingkat pendidikan terakhir di dominasi oleh tingkat pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 16 orang dari keseluruhan sampel.

Gambar 4.7

Penghasilan Perbulan Responden

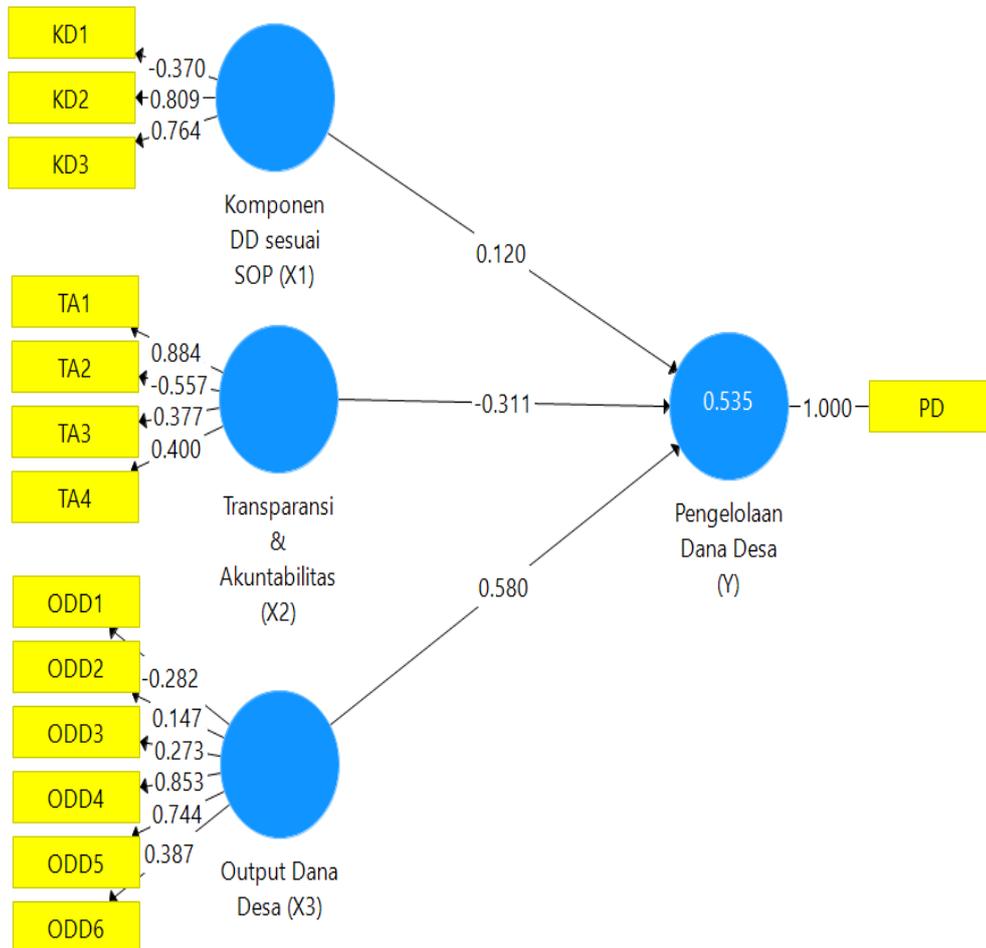


Sumber : Data primer dan diolah

Berdasarkan gambar 4.7 menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendapatan Rp. < 2 juta berjumlah 1 orang, sedangkan responden dengan tingkat pendapatan Rp. 2 juta s/d 3 juta berjumlah 19 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden menurut tingkat penghasilan perbulan didominasi oleh tingkat pendapatan Rp. 2 juta s/d 3 juta sebanyak 19 orang dari keseluruhan sampel.

4.5.3 Hasil Penelitian Analisis SEM-PLS

Gambar 4.8 First Outer Loading



Tabel 4.13

Kuesioner Variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP

No.	Pernyataan	Kriteria
1.	Pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.	Tidak Memenuhi
2.	Dana desa disalurkan secara bertahap, tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%.	Memenuhi
3.	Prioritas dana desa berdasarkan Permendesa PDTT 13 Tahun 2020.	Memenuhi

“ pada bagian pengelolaan dana desa yang dipedomi Permandagri 113 Tahun 2014 yang mana pengelolaan keuangan Desa jelas tidak memenuhi, penyebab utamanya banyak diantaranya ialah, tidak diterapkannya kesesuaian dalam SOP yang sudah berlaku dengan selayaknya pada bagian birokrasi pemerintahan desa maka jelas hasil dari bagian ini tidak memnuhi dikarenakan pada pemerintahan tidak memiliki integritas dalam menjawab, maka hasil dari uji pada bagian ini ialah 0,370 dan tidak memenuhi sesuai dengan olahan data menggunakan smart PLS”

Tabel 4.14

Kuesioner Variabel Transparansi & Akuntabilitas

No.	Pernyataan	Kriteria
1.	Informasi selalu diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat tentang Perencanaan Keuangan Desa.	Memenuhi
2.	Tahapan pengelolaan keuangan dana desa melibatkan unsur-unsur masyarakat.	Tidak Memenuhi
3.	Musyawarah desa menjadi bagian dari sistem pengawasan aliran dana desa.	Tidak Memenuhi
4.	Kepala desa bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya yang bersumber dari Dana Desa.	Tidak Memenuhi

“kuisisioner variabel pada bagian transparansi dan akuntabilitas, yang mana pemerintah desa selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan keuangan desa dengan hasil yaitu 0,809 dan dari hasil tersebut dikatakan memenuhi dari hasil uji menggunakan smart PLS”

Tabel 4.15

Kuesioner Variabel Output Dana Desa

No.	Pernyataan	Kriteria
1.	Fasilitas umum yang digunakan masyarakat saat ini hasil dari Dana Desa.	Tidak Memenuhi
2.	Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).	Tidak Memenuhi
3.	Pendirian dan pengembangan polindes	Tidak Memenuhi
4.	Pembangunan Jalan desa dan Jembatan desa.	Memenuhi
5.	Pembinaan PAUD desa.	Memenuhi
6.	Pembangunan dan Pengelolaan air bersih dan MCK.	Tidak Memenuhi

“ pada bagian variabel output dana desa yang paling memiliki hubungan dan pengaruh kuat ialah pembangunan jalan desan dan jembatan desa kemudian pembinaan paud desa, kedua hal ini yang paling memiliki hubungan variabel output dengan menggunakan dana desa yang mana hasil indikatornya ialah 0,764 hasil tersebut menggunakan uji smart PLS. dari enam indikator variabel yang digunakan peneliti”

4.5.3.1 Convergent Validity

Convergent validity merupakan pengukuran model pada indikator yang bersifat reflektif. Dimana dilihat dari skor butir pertanyaan dengan skor kontruknya atau melalui *loading factor* pada masing-masing indikator konstruk.

Adapun parameter dalam menetapkan bahwa nilai *convergent validity* layak/terpenuhi dapat dilakukan dengan melihat nilai *rule of thumb*, dimana nilai *loading factor* lebih besar dari 0,60 – 0,70, namun dapat juga diterima rentang *loading factor* lebih besar dari 0,50 – 0,60 (Ghozali dan Latan, 2012:74). Berdasarkan hasil analisis data pada *convergent validity* pada indikator-indikator pada masing-masing variabel, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. *Convergent Validity* Pada Komponen Dana Desa Sesuai SOP

Indikator konstruk pada variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP berjumlah 3 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.16

Convergent Validity Komponen Dana Desa Sesuai SOP

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
KD1	-0,370	0,70	Tidak Memenuhi
KD2	0,809	0,70	Memenuhi
KD3	0,764	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

2. *Convergent Validity* Pada Transparansi & Akuntabilitas

Indikator konstruk pada variabel Transparansi & Akuntabilitas berjumlah 4 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.17

Convergent Validity Tranparansi & Akuntabilitas

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
TA1	0,884	0,70	Memenuhi
TA2	-0,557	0,70	Tidak Memenuhi
TA3	0,377	0,70	Tidak Memenuhi
TA4	0,400	0,70	Tidak Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

3. *Convergent Validity* Pada Output Dana Desa

Indikator konstruk pada variabel Output Dana Desa berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.18

Convergent Validity Output Dana Desa

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
ODD1	-0,282	0,70	Tidak Memenuhi
ODD2	0,147	0,70	Tidak Memenuhi
ODD3	0,273	0,70	Tidak Memenuhi
ODD4	0,853	0,70	Memenuhi
ODD5	0,744	0,70	Memenuhi
ODD6	0,387	0,70	Tidak Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

4. *Convergent Validity* Pada Pengelolaan Dana Desa

Indikator konstruk pada variabel Pengelolaan Dana Desa berjumlah 1 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.19

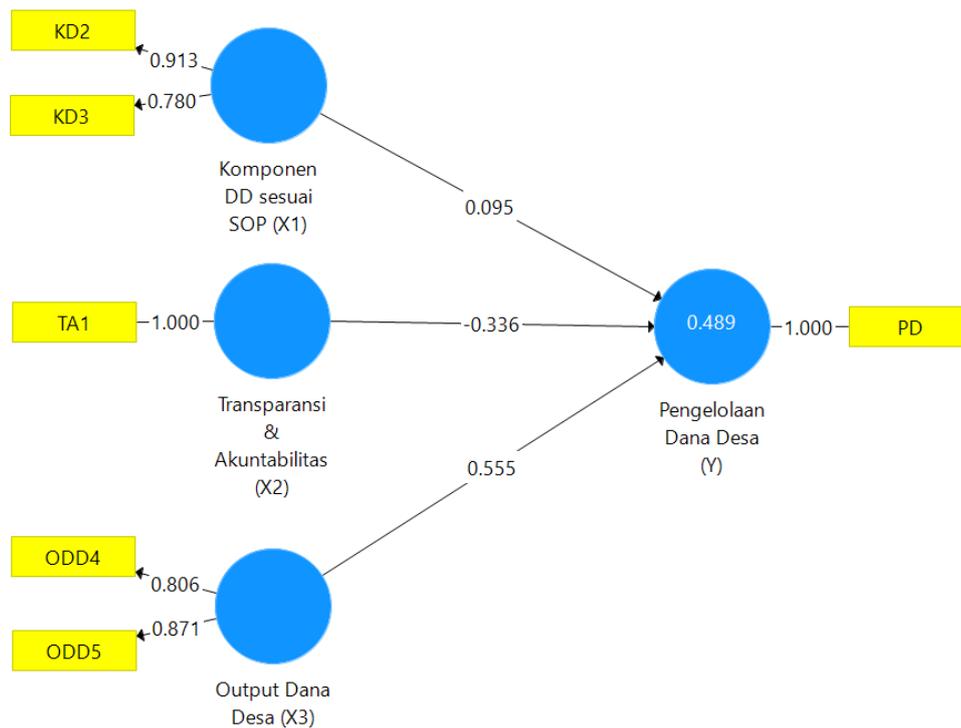
***Convergent Validity* Pengelolaan Dana Desa**

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
PD	1,000	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan tabel *convergent validity* indikator konstruk pada masing-masing variabel, maka dapat di kemukakan bahwa untuk indikator konstruk pada variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP yang tidak memenuhi nilai *loading factor* adalah indikator konstruk KD1. Variabel Tranparansi & Akuntabilitas yang tidak memenuhi nilai *loading factor* adalah indikator konstruk TA2, TA3, dan TA4. Variabel Output Dana Desa yang tidak memenuhi nilai *loading factor* adalah indikator konstruk ODD1, ODD2, ODD3, dan ODD6. Variabel Pengelolaan Dana Desa seluruh indikator konstruk memenuhi nilai *loading factor*.

Ketentuan dalam analisis convergent validity, jika nilai loading factor tidak terpenuhi maka indikator konstruk dibuang dan dilakukan analisis convergent validity kembali. Adapun hasil analisis convergent validity setelah indikator-indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai loading factor dibuang dapat dikemukakan pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.9 Second Outer Loading

Hasil model pengukuran menggunakan convergent validity pada tahap kedua pada indikator konstruk pada masing-masing variabel dapat dikemukakan pada tabel dibawah ini :

1. Convergent Validity Pada Komponen Dana Desa Sesuai SOP

Indikator konstruk pada variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai *loading factor* dibuang, maka

berjumlah 2 (dua) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.20

***Convergent Validity* Komponen Dana Desa Sesuai SOP**

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
KD2	0,913	0,70	Memenuhi
KD3	0,780	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

2. *Convergent Validity* Pada Tranparansi & Akuntabilitas

Indikator konstruk pada variabel Transparansi & Akuntabilitas setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai *loading factor* dibuang, maka berjumlah 1 (satu) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.21

***Convergent Validity* Tranparansi & Akuntabilitas**

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
TA1	1,000	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

3. *Convergent Validity* Pada Output Dana Desa

Indikator konstruk pada variabel Output Dana Desa setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai *loading factor* dibuang, maka berjumlah (dua) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.22
Convergent Validity Output Dana Desa

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
ODD4	0,806	0,70	Memenuhi
ODD5	0,871	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

4.5.3.2 Discriminante Validity

Dalam analisis *discriminant validity* dimana model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk bersifat reflektif dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading* pada masing-masing variabel. Dalam pengujian *discriminant validity* menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE). adapun parameter *cross loading* dalam menilai nilai *average variance extracted* untuk mengetahui tingkat validitas dari masing-masing indikator konstruk pada setiap variable direkomendasikan lebih besar dari 0,50 ($> 0,50$) (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Hasil analisis *discriminant validity* dapat dikemukakan pada table di bawah ini:

Tabel 4.23
Discriminante Validity Pada Avarage Extracted (AVE)

Variabel	Nilai
Komponen Dana Desa Sesuai SOP	0.849
Transparansi & Akuntabilitas	1.000
Output Dana Desa	0.839
Pengelolaan Dana Desa	1.000

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel 4.23 memperlihatkan bahwa nilai *average variance extracted* pada masing-masing variable tidak memenuhi kriteria dalam *discriminant validity*, hal ini disebabkan nilai *average variance extracted* pada masing-masing variabel $< 0,50$, maka untuk memenuhi persyaratan dalam *discriminant validity* dimana nilai AVE lebih besar dari 0,50, maka indikator-indikator konstruk yang memiliki nilai *loading factor* paling rendah/kecil dikeluarkan dalam model pengukuran.

Berdasarkan hasil analisis dimana nilai *loading factor* pada indikator konstruk paling rendah pada variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP adalah KD3, dan variabel Output Dana Desa adalah ODD4.

4.5.3.3 Composite Reliability

Dalam melakukan uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Penggunaan *composite reliability* dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Adapun dalam melakukan penilaian terhadap *composite reliability* melalui *rule of thumb*, dimana nilai *composite reliability* harus lebih besar dari 0,70 ($> 0,70$). Pengujian reliabilitas pada setiap konstruk juga dapat dilakukan menggunakan *Cronbach's Alpha*, ketentuan dari penilaian dilakukan melalui *rule of thumb*, dimana nilai *Cronbach's Alpha* harus lebih besar dari 0,70 ($> 0,70$). Hasil dari analisis data memperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 4.24
Composite Reliability

Variabel	Nilai	Keterangan
Komponen Dana Desa sesuai SOP	0.837	Reliabel
Transparansi & Akuntabilitas	1.000	Reliabel
Output Dana Desa	0.826	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa	1.000	Reliabel

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel 4.24 memperlihatkan bahwa nilai *composite reliability* pada variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP, Transparansi & Akuntabilitas, Output Dana Desa dan Pengelolaan Dana Desa, masing-masing sebesar 0.837 ; 1.000 ; 0.826 ; dan 1.000. Seluruh nilai *reliability construct* $> 0,70$. Maka dalam hal ini

keberadaan variabel memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

4.5.3.4 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian pada model strukturan (*inner model*) pada dasarnya bertujuan untuk melihat hubungan antara variable. Adapun pengukuran dilakukan dengan melihat nilai *R-Square*. Dimana nantinya dapat diketahui tingkat *variance* terhadap perubahan variable independent (perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi) terhadap variable dependent (penyerapan anggaran). Hasil analisis *R-Square* dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.25
R-Square

	<i>R-Square</i>
Pengelolaan Dana Desa	0.489

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel 4.25 memperlihatkan nilai *R-Square* pada variable penyerapan anggaran sebesar 0,489. Maka dapat dijelaskan bahwa *variance* pada variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP, Transparansi & Akuntabilitas, dan Output Dana Desa mampu menjelaskan variabel Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,489. Berdasarkan pendapat Chin (Ghozali dan Latan, 2015) mengemukakan kriteria *R-Square* jika *Rule of Thumb* sebesar 0,67 maka model penelitian dalam kategori kuat, 0,33 model penelitian dalam kategori moderat, 0,19 model penelitian dalam kategori lemah. Berdasarkan temuan penelitian dimana nilai *R-Square* sebesar 0,489. Maka model penelitian dalam kategori moderat.

4.5.3.5 Pengujian Hipotesis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SEM-PLS dalam uji hipotesis, maka dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.26
Uji Hipotesis

	Original Sample	T Statistic	P Values	Keputusan
X1 → Y	0.120	0.493	0.622	H0 diterima
X2 → Y	-0.311	1.078	0.281	H0 diterima
X3 → Y	0.580	2.152	0.032	H0 ditolak

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel 4.26 dapat dijelaskan bahwa ketentuan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai original sample sebagai nilai *coefficient* atau disebut juga nilai beta. Dalam menetapkan penerimaan atau penolakan pada H0 dalam pengujian hipotesis, dapat dilihat dari nilai pada kolom T Statistic dan nilai pada kolom P Values. Adapun ketentuannya adalah jika nilai t statistic lebih besar dari nilai t table ($t \text{ statistic} > t \text{ tabel}$) pada taraf signifikansi 5 % (t table dilihat dari jumlah sampel, dimana sampel pada penelitian ini berjumlah 20 orang) atau menggunakan nilai *P Value* dengan ketentuan jika $< 0,05$, dimana kesimpulannya tolak H0, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan, begitu juga sebaliknya.

Hasil analisis data :

1. Pengaruh Komponen Dana Desa sesuai SOP terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba (X1 → Y)

Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Komponen Dana Desa sesuai SOP terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba berdasarkan tabel 4.21 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 0,493 sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 5% diperoleh sebesar 2,086 berdasarkan jumlah sampel sebesar 20 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ tabel}$ ($0,493 < 2,086$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan *P Value*, dengan ketentuan $p < 0,05$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,622 > 0,05$.

Ketentuannya terima H_0 , maka disimpulkan bahwa Komponen Dana Desa sesuai SOP tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.

2. Pengaruh Tranparansi & Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba (X2 → Y)

Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Tranparansi & Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba berdasarkan tabel 4.21 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 1,078 sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 5% diperoleh sebesar 2,086 berdasarkan jumlah sampel sebesar 20 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ tabel}$ ($1,078 < 2,086$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan *P Value*, dengan ketentuan $p < 0,05$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,281 > 0,05$.

Ketentuannya terima H_0 , maka disimpulkan bahwa Transparansi & Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.

3. Pengaruh Output Dana Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba ($X_3 \rightarrow Y$)

Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Output Dana Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba berdasarkan tabel 4.21 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 2,152 sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 5% diperoleh sebesar 2,086 berdasarkan jumlah sampel sebesar 20 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa t statistic $>$ t tabel ($2,152 > 2,086$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan *P Value*, dengan ketentuan $p < 0,05$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,032 < 0,05$.

Ketentuannya tolak H_0 , maka disimpulkan bahwa Output Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Komponen Dana Desa sesuai SOP terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba memperlihatkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ tabel}$ ($0,493 < 2,086$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan *P Value*, dengan ketentuan $p < 0,05$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,622 > 0,05$. Maka Ketentuannya terima H_0 , bahwa Komponen Dana Desa sesuai SOP tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.
2. Berdasarkan Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Tranparansi & Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba memperlihatkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ tabel}$ ($1,078 < 2,086$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan *P Value*, dengan ketentuan $p < 0,05$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,281 > 0,05$. Maka Ketentuannya terima H_0 , bahwa Transparansi & Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.
3. Berdasarkan Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Output Dana Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba memperlihatkan bahwa $t \text{ statistic} > t \text{ tabel}$ ($2,152 > 2,086$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan *P Value*, dengan ketentuan $p < 0,05$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,032 < 0,05$. Maka Ketentuannya tolak H_0 , bahwa Output Dana

Desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.

4. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor konstruksi masih mendominasi penyumbang PDRB terbesar di Kawasan Kaldera Toba.
5. Sektor pariwisata belum menjadi penyumbang PDRB di Kawasan Kaldera Toba.
6. Garis kemiskinan di Kawasan Kaldera Toba masih berada dibawah garis kemiskinan Nasional dan dibawah garis kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.
7. IPM di Kawasan Kaldera Toba yang berstatus “sedang” masih berada dibawah IPM provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang berstatus “tinggi”.

5.2 Saran

1. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan dan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai.
2. Pemerintah desa harus lebih Transparansi dalam menerapkan kebijakan-kebijakan penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan.
3. Pemerintah harus mengembangkan potensi kawasan Kaldera Toba melalui sektor pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan cara mengembangkan nilai-nilai budaya, kerajinan tangan, dan kuliner sehingga wisatawan yang datang berkunjung tidak hanya melihat danau nya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2005). *pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. yogyakarta: BPFE-UGM.
- bdillah, M. F. (2017). Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Deli Serdang. 28, 29, 30.
- Azwardi. (2014). Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. 20, 21, 22.
- Badan Pusat Statistik. *indeks pembangunan desa 2018*. Retrieved from www.bps.go.id: <http://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara*. (2020). Retrieved from www.bps.sumut.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun*. (2020). Retrieved from www.simalungunkab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir*. (2020). Retrieved from www.samosirkab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir*. (2020). Retrieved from www.tobasakab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi*. (2020). Retrieved from www.dairikab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo*. (2020). Retrieved from www.karokab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara*. (2020). Retrieved from www.tapanuliutarakab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan*. (2020). Retrieved from www.humbanghasundutankab.bps.go.id.
- buku pintar dana desa*. (2017). Jakarta: Kementerian keuangan rebuplik indonesia.
- Dana Desa. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah*
- Djojohadikusumo, S. (1994). *perkembangan pemikiran ekonomi : dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan*. jakarta: Pustaka LP3ES.
- DKK, S. (2019). *Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*.
- fahrurozi, m. (n.d.).
- Handra. (2017). Analisis Kebijakan Dana Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan. 14, 15, 16, 17.
- Husain, U. (2003). *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Jhingan, M. (2000). *ekonomi pembangunan dan perencanaan daerah*. jakarta: PT Rajawali Pers.
- Kementerian Desa PDTT. *Dana Desa*. <http://www.kemendes.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Rincian Dana Desa APBN 2019*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Rincian Dana Desa APBN 2020*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Rincian Dana Desa APBN 2021*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Kuncoro, M. (2000). *ekonomi pembangunan : teori, masalah, kebijakan (edisi pertama)*. yogyakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2004). *otonomi dan pembangunan daerah*. jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Latan, I. G. (n.d.). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Otonomi Desa. *Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang *Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia *Tentang Pengelolaan Dana Desa*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 "*Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025*".
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat . *Economics Development Analysis Journal* , 108.
- Mankiw, G. N. (2007). *macroeconomics*. jakarta: Erlangga.
- Peggy, R. A. (1993). *keuangan negara dalam teori dan praktek (edisi kelima)*. jakarta: erlangga.
- Raharjo, a. (2006). *pembangunan pedesaan dan perkotaan*. yogyakarta: Graha ilmu Yogyakarta.
- Rahayu, A. S. (2014). *pengantar kebijakan fiskal*. jakarta: bumi aksara.
- RS, P. H. (2018). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Indonesia ; Peningkatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Pada Provinsi Se-Indonesia.
- RS, P. H. (n.d.). Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.
- Rusli, B. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan.

- Smith, A. (n.d.). *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.
- Sugiarto, T. J. (1998). *Lisrel*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sujianto, A. E. (2009). *Aplikasi Statistik dengan Spss 16.0*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Smith, P. M. (2011). *pembangunan ekonomi jilid 1 (edisi kesebelas)*. jakarta: Erlangga.
- Sukanto, A. (2014). efektivitas dana desa (ADD) dan kemiskinan di provinsi sumatera selatan. *ekonomi pembangunan*, 29-41.
- Sukirno, S (2010). *makroekonomi*. jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

“KEBIJAKAN DANA DESA ; IMPLEMENTASI PENURUNAN KETIMPANGAN EKONOMI DESA-KOTA UNTUK PENINGKATAN EKONOMI PADA KAWASAN KALDERA TOBA SUMATERA UTARA”

Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Sdr/i Pemerintah Desa
Di Tempat

Dengan Hormat,

Melalui kesempatan ini, saya Wahyu Ramadhani mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian ini, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program studi Ekonomi Pembangunan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun Pemerintah desa. Oleh karena itu mohon kesediaannya untuk mengisi/menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan. **Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan dan kerahasiaan data yang di isi akan tetap di jaga.**

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan Terima Kasih.

Hormat Saya,

Wahyu Ramadhani

I. Identitas Responden

Petunjuk Pengisian: *Mohon kesediaannya mengisi dan memberi tanda centang (√) pada kolom identitas dibawah ini.*

N a m a : _____

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Jabatan : _____

A l a m a t : _____

No. HP : _____

II. Data Kondisi Sosial dan Ekonomi

1. Golongan Usia saudara :

a. < 25 Tahun

b. 25 – 35 tahun

c. 36 – 46 Tahun

d. 47 – 60 Tahun

e. > 60 Tahun

2. Pendidikan Terakhir :

a. SMP Sederajat

b. SMA Sederajat

c. D-III (Ahli Madya)

d. S-1 (Sarjana)

e. S-2/S-3 (Pasca Sarjana)

3. Rata-rata tingkat penghasilan perbulan :

a. Rp. < 2 juta

b. Rp. 2 juta s/d 3 juta

c. Rp. 3 juta s/d 4 juta

d. Rp. 4 juta s/d 5 juta

e. Rp. > 5 juta

III. KOMPONEN DANA DESA SESUAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Petunjuk Pengisian : *Isilah jawaban sesuai pendapat Saudara dengan memberikan tingkat penilaian dikolom yang tersedia.*

1. Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				

2. Dana Desa disalurkan secara bertahap, tahap I sebesar 40 %, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20 %.

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				

3. Prioritas Dana Desa berdasarkan Permendesa PDTT 13 tahun 2020.

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				

IV. TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

1. Informasi selalu diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat tentang perencanaan keuangan desa.

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				

2. Pengelolaan dana desa disajikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat.

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				

3. Pemerintah desa ataupun BPD selalu mengundang masyarakat pada setiap rapat perencanaan pengelolaan keuangan desa setiap kali di adakan.

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				

4. Kepala desa bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan keuangan desa, termasuk didalamnya yang bersumber dari Dana Desa.

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				

V. OUTPUT DANA DESA

1. Fasilitas umum yang digunakan masyarakat saat ini hasil dari Dana Desa.

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				

2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				

3. Pembinaan PAUD desa.

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				

4. Pembangunan jalan desa dan jembatan desa.

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				

5. Pendirian dan pengembangan Polindes.

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				

6. Pembangunan dan pengelolaan air bersih dan MCK.

1	2	3	4	5
<input type="text"/>				







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 185/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/4/3/2021

Nama Mahasiswa : Wahyu ramadhani
NPM : 1705180008
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset ekonomi dan bisnis
Tanggal Pengajuan Judul : 4/3/2021
Nama Dosen pembimbing' : Prawdya H R C
Judul*) : Analisa. Penabdolan Para Desa sebagai Implementasi
Desentralisasi. Fiskal dalam meningkatkan Perencanaan
Daerah Kabupaten

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(.....)

Keterangan:

*) Ditulis oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditulis oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan upload/di tembak ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.

Halaman ke 2 dan 2 halaman



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 185/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/4/3/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 4/3/2021

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wahyu ramadhani
NPM : 1705180008
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset ekonomi dan bisnis

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Implementasi desentralisasi fiskal

Rencana Judul

1. Analisa pengolahan dana desa sebagai implementasi desentralisasi fiskal dalam meningkatkan perekonomian daerah kaldera toba
2. Analisa perilaku dan persepsi wisatawan terhadap kawasan wisata kaldera toba di era new normal
3. Strategi pengembangan wilayah kaldera toba sebagai objek wisata

Objek/Lokasi Penelitian : Masyarakat dikawasan kaldera toba

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Wahyu ramadhani)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : WAHYU RAMADHANI
N.P.M : 1705180008
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Proposal : KEBIJAKAN DANA DESA ; IMPLEMENTASI PENURUNAN KETIMPANGAN EKONOMI DESA-KOTA UNTUK PENINGKATKAN EKONOMI PADA KAWASAN KALDERA TOBA SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
Rabu, 17-03-2021	Bab I harus lebih diperjelas Dulu yg nyatakan latar belakang masalah, dan identifikasi masalah.		
Selasa, 30-03-2021	Bab I : Tujuan dan Rumusan Penelitian harus singkat forward.		
Selasa, 06-04-2021	Bab II : Grand theory gunakan Text Book dan Peneliti terdahulu sesuai dgn judul skripsi.		
Rumate, 03-04-2021	Bab II : tambahkan rumusan yg kelengkapan Dana Desa. → SDG Nasional & Desa Jurnal Kelemba Penelitian dan Hipotesis.		
Senin, 19-04-2021	Hipotesis hrs sesuai dgn konsep rum Bab III, bisa yg dirum, sesuai dgn Tujuan Penelitian.		
Rabu, 21/4-2021	Bab I, II, dan III sdh ok!! Acc y skrup		

Pembimbing Proposal

Dr. PRAWIDYA HARIANI S.E., M.Si

Medan, 21 April2021
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Jum'at, 07 Mei 2021** menerangkan bahwa:

Nama : Wahyu Ramadhani
N .P.M. : 1705180008
Tempat / Tgl.Lahir : Kw. Mencirim, 14 Januari 1999
Alamat Rumah : Jl. Samanhuri Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai
JudulProposal : Kebijakan Dana Desa ; Implementasi Penurunan Ketimpangan Ekonomi Desa-Kota Untuk Peningkatan Ekonomi Pada Kawasan Kaldera Toba Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dr. Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.*

Medan, Wahyu Ramadhani

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Pemanding

Dra.Hj.Lailan Safina Hasibuan, M.Si

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan -

Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : WAHYU RAMADHANI
NPM : 1705180008
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : KEBIJAKAN DANA DESA ; IMPLEMENTASI PENURUNAN
KETIMPANGAN EKONOMI DESA-KOTA UNTUK
PENINGKATAN EKONOMI PADA KAWASAN KALDERA TOBA
SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
Skripsi

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Diketahui /Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

H. JANURI, S.E, M.M, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rector@umsu.ac.id

Nomor : 1696 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2021
Lampiran :
Perihal : IZIN RISET PENDAHULUAN
Medan, 24 Dzulhijjah 1442 H
03 Agustus 2021 M

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Pimpinan
Desa Sibaganding Parapat Dan Desa Sipinsur Batu Raja
Jln.Parapat Dan Sipinsur Batu Raja
Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program **Studi Strata Satu (S-1)**

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Wahyu Ramadhani
Npm : 1705180008
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Semester : VIII (Delapan)
Judul : Kebijakan Dana Desa Implementasi Penurunan Ketimpangan Ekonomi Desa - Kota Untuk Peningkatan Ekonomi Pada Kawasan Kaldera Toba Sumatera

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr.Wb



Dekan

H. JANURI, SE., MM., M.Si.

Tembusan :

1. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email : rector@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1696 / TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Pada Tanggal : 03 Agustus 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Wahyu Ramadhani
N P M : 1705180008
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / Skripsi : Kebijakan Dana Desa Implementasi Penurunan Ketimpangan
Ekonomi Desa - Kota Untuk Peningkatan Ekonomi Pada Kawasan
Kaldera Toba Sumatera

Dosen Pembimbing : Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 03 Agustus 2022
4. Revisi Judul.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 24 Dzulhijjah 1442 H
03 Agustus 2021 M



Dekan

H. JANURI, SE.,MM.,M.Si.

Tembusan :
1. Pertiinggal